Kyai Nurul

SANG KYAI *bicara* AGAMA & POLITIK

Dr. Cecep Suryana, M.Si,
Elsavani Prima Putri, Faisal Muh. Amanullah, Khairunissa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kyai Nurul

SANG KYAI *bicara* AGAMA & POLITIK

Dr. Cecep Suryana, M.Si,
Elsavani Prima Putri, Faisal Muh. Amanullah, Khairunissa

Pasal 44

1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

SANG KIAI BICARA AGAMA & POLITIK

Perspektif KH. Nurul Ain Akyas, Lc. Dipl.

Penulis:

Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.

Elsavani Prima Putri, S.IP

Faisal Muhammad Amanullah, S.I.Kom

Khairunissa, S.Sos

Editor:

Asep Iwan Setiawan

GUNUNG DJATI PUBLISHING

2023

SANG KIAI BICARA AGAMA & POLITIK

Perspektif KH. Nurul Ain Akyas, Lc. Dipl.

Penulis:

Dr. H. Cecep Suryana, M.Si

Elsavani Prima Putri, S.IP

Faisal Muhammad Amanullah, S.I.Kom

Khairunissa

Editor:

Asep Iwan Setiawan

ISBN: 978-623-5485-75-1

Penerbit: Gunung Djati Publishing Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarkat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution 105,Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

https://lp2m.uinsgd.ac.id

Cetakan Pertama, Desember 2023 Hak Cipta dilindugi Undang-Undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Tak lupajuga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik, rekan-rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku yang berjudul ‘Sang Kiai: Bicara Agama dan Politik’ ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan pengetahuan tentang komunikasi politik. Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya peran Kiai dalam dunia politik dan juga bagaimana harusnya sikap Kiai ketika terjun kedunia politik. Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai komunikasi politik Terima kasih.

Bandung, Desember 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

PENDAHULUAN **1**

Bagian 1 Profil Sang Kiai **6**

Bagian 2 Sang Kiai dalam Lingkaran Politik **11**

A. Selayang Pandang Komunikasi Politik 11
B. Dinamika Kiai dalam Lingkaran Politik 26

Bagian 3 Sang Kiai Berpolitik **36**

Bagian 4 Sang Kiai dalam Parlemen **50**

A. Kenapa Kiai harus Berjuang di Parlemen 50
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) *53*
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) *54*
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) *54*

Bagian 5 Sang Kiai Bicara Agama dan Politik **68**

Bagian 6 Sang Kiai Bicara Sistem Negara dalam Islam **77**

Bagian 7 Agama dan Politik di Cirebon dan Indonesia **85**

A. Agama dan politik di Cirebon 85
B. Pesta Demokrasi 2024 90

PENUTUP **92**

DAFTAR PUSTAKA **94**

TENTANG PENULIS **99**

الإدارة العالية لجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dimana tidak ada pembatasan bagi siapa saja dan dari latar belakang apapun untuk masuk ke dalam dunia politik. Hal inilah yang menjadi landasan utama semua orang untuk ikut berpartisipasi di dalam dunia politik mulai dari kalangan orang yang biasa hingga orang yang sangat dihormati. Semua bisa antusias dan mempunyai peluang yang sama untuk mencalonkan diri mulai dari menjadi kepala desa hingga menjadi kepala negara. Pandangan tentang pentingnya berpartisipasi politik berbeda dari sistem politik yang satu terhadap sistem politik yang lain. Pengertian dan bentuk partisipasi politik di dalam kehidupan masyarakat yang berbeda dan bentuk partisipasi di dalam kehidupan masyarakat demokratis.

Dalam kontestasi politik di Indonesia tidak bisa lepas dari peran serta tokoh agama. Dalam pemilu, tokoh agama kerap kali dijadikan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik dan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk memilih dirinya, perebutan suara ulama bukan saja dilakukan oleh parpol yang berbasis Islam saja, melainkan juga parpol yang berbasis Nasionalis. Peran para tokoh agama sangat dibutuhkan dalam proses pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena sesungguhnya di mata masyarakat tokoh agama merupakan sosok yang paling disegani dan patut untuk diteladani.

Para kiai, penasihat, guru, dan cendekiawan adalah orang yang paling tinggi prestisenya dikalangkan umat. Realita yang terdapat dimasyarakat, Tokoh agama mampu mengubah sifat, cara pandang bahkan tingkah laku seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Hal ini dipengaruhi berkat dari jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh agama tersebut. Peranan tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi dimasyarakat pada zaman yang semakin modern dan demokratis. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai Informal leadership kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan.

Posisi menonjol para tokoh agama ini lebih tampak ketika partai politik secara intens safari langsung ke masyarakat. Ini terjadi karena tokoh agama sendiri adalah bagian dari elite politik, suatu posisi yang strategis dan diklaim mempunyai posisi kekuasaan yang sah untuk mempersatukan umat dalam berbagai macam tantangan yang nyata dari kelompok-kelompok lain. Konteks politik, tokoh agama lebih sering terlibat dan bukan hal lumrah lagi jika para tokoh agama menjadi pendukung salah satu paslon atau partai politik tertentu. Figur para tokoh yang karismatik dalam konteks sosial politik memang sering kali diterlibatkan oleh elemen – elemen politik kekuasaan.

Suara dari tokoh agama dapat juga menjadi corong politik untuk mendongkrak elektabilitas politik itu sendiri, untuk meraup dukungan suara dari para pengikutnya yang terjalin dalam ikatan-ikatan kultural. Tokoh agama tersebut yang justru berperan langsung dalam keberlangsungan politik, misalnya mengikuti

secara langsung saat kampanye, untuk memenangkan partai yang di dukungnya atau bahkan ulama ikut mencalon dalam pemilu tersebut dalam Bernegara.

Sang Kiai Bicara Agama dan Politik

Perspektif KH. Nurul 'Ain Akyas, Lc., Dipl

Sejarah Islam, tokoh agama memiliki posisi yang penting dalam berjalannya negara. Tokoh Agama diyakini mampu menafsirkan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya, menjadikan posisinya sangat tinggi. Tokoh agama bukanlah sebuah jabatan tertentu yang diangkat secara resmi, namun jabatan yang disematkan atas capaian keilmuan yang didapatkannya. Dalam negara islam masa lalu tokoh agama sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah.

Keberadaan tokoh agama dalam negara menjadi pengontrol penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Penguasa dalam negara Islam wajib untuk menjalankan aturan islam dalam setiap kebijakannya. Peran elite agama dan elite penguasa cukup mempengaruhi kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Kelompok tersebut antara lain aparat pemerintah dan tokoh masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam bidang politik adalah Tokoh agama. Bagi masyarakat ialah sosok penting dalam kelangsungan hidup keberagamaan.

Tokoh agama tidak hanya sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan saja, namun juga sebagai tempat untuk mencurahkan berbagai keluh kesah dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada masyarakat tradisional biasanya para tokoh

agama menjadi tempat untuk meminta solusi dari berbagai persoalan, seperti masalah keluarga, pendidikan, jodoh bahkan memilihkan waktu untuk memulai suatu pekerjaan hingga soal-soal politik

Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden nanti, diharapkan tidak ada lagi perpecahan seperti selayaknya dalam pemilihan sebelumnya, ada istilah-istilah cebong kampret serta yang lainnya. Semua memiliki pilihan sesuai keyakinannya masing-masing, dalam demokrasi hal tersebut harus dihargai. Oleh sebab itu, silahkan tentukan pilihan yang terbaik diantara yang baik, tanpa harus menghina calon lain sehingga menimbulkan perpecahan diantara masyarakat.

> *"Sesungguhnya memimpin manusia merupakan kewajiban yang paling utama, bahkan tidak tegak urusan agama dan dunia kecuali dengan adanya kepemimpinan",* perkataan beliau ini diakhiri dengan: *"Maka memilih pemimpin menjadi kewajiban agama dan ibadah kepada Allah Swt".* (Ibnu Taimiya).

Di dalam buku ini bagaimana belajar agama dan politik menjadi lebih bermakna dimana keterlibatan tokoh agama dalam dunia politik sebenarnya mempunyai efek yang positif salah satunya adalah bisa mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun apabila keterlibatan tersebut untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pilihannya dalam pemilihan umum tentu tidak bisa dibenarkan. Karena sejatinya dalam pemilihan umum masyarakat bebas memilih sesuai dengan keinginan hatinya bukan karena dorongan

dari siapapun baik itu seorang ulama atau kiai yang cukup berpengaruh dalam masyarakat setempat ataupun orang lain.

Bagian 1

Profil Sang Kiai

Ustadz Nurul Ain Akyas, Lc. Dipl. Lahir di Cirebon pada tahun 1972. Menempuh Pendidikan sekolah dasar di SDN Pabedilan Kulon II Cirebon pada tahun dan lulus 1984, dilanjutkan di MTS Yatamu Pasawahan Cirebon dan lulus 1987, dilanjutkan di MA MTS Yatamu Pasawahan Cirebon dan lulus 1990 dan melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Anwar Pasawahan Cirebon. Pesantren tersebut didirikan oleh Haji Muhammad Anwar ia merupakan ayah dari K.H. Abdur Rasyid yang merupakan guru dari Ustadz Nurul Ain Akyas sebelumnya belajar. K.H Abdur Rasyid merupakan murid dari K.H Hasyim Ash'ari di Jombang. Haji Muhammad Anwar adalah putra dari mbah Ismail yang merupakan salah satu dari prajurit diponegoro atau murid dari Sentot Ali Basya.

Setelah belajar selama enam tahun di pesantren tersebut Ustadz Nurul Ain Akyas diamanah kan oleh orang tua nya untuk melanjutkan Pendidikan di Jakarta, dengan syarat mencari beasiswa karena keterbatasan ekonomi keluarga. Meskipun keinginan nya adalah melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Cirebon. Dan pada akhirnya Ustadz Nurul Ain Akyas melanjutkan Pendidikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab dari tahun 1990 hingga 1997 dan diwisuda pada tahun 1998.

Motivasi Kiai dalam Membangun Pondok Pesantren

Selama kuliah, tepatnya di hari sabtu dan minggu Ketika libur kuliah Ustadz Nurul Ain Akyas cukup aktif mengikuti kegiatan pengajian di kajian tafsir di Yayasan Al-Hikmah Banka II Pelamampang, Jakarta Selatan. Kajian tersebut dikelola oleh K.H. Abdul Hasib Hasan, LC.MA. Yang asli Betawi, dan lulusan dari Saudi tepatnya di Riyadh.

Setelah mengikuti kajian tafsir secara rutin, suatu pagi setelah pengajian selesai. Terbesit oleh K.H Abdul Hasib Hasan untuk mendirikan pesantren. Kenapa memilih mendirikan pesantren, karena Yayasan Al-Hikmah yang ada dijakarta tersebut sudah memiliki TKIT, SDIT, SMPIT, aliyah hingga perguruan tinggi dan hanya pesantren yang belum ada. K.H Abdul Hasib Hasan, dan beliau menawarkan untuk membuat pesantren Al-Qur'sn untuk anak-anak, yang bukan hanya fokus menghafal Al-Qu'ran, tetapi juga fokus ke Pendidikan akademik di sekolah-sekolah formal.

Tetapi karena belum memiliki contoh dan gambaran pesantren yang diinginkan, mereka memutuskan untuk berangkat ke kudus dan menginap beberapa hari, dan mengamati hingga 24 jam keadaan pesantren disana, apa saja kegiatannya, apa saja programnya, bagaimana pengajaran serta kurikulumnya, cara menghafal dan lain sebagainya. Setelah dirasa cukup akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Dan timbul pertanyaan, bagaimana caranya membangun pesantren Al-Qur'an anak yang tidak memaksa anak-anak untuk menghafal, bagaiman caranya

agar anak-anak merasa nyaman berada di pesantren. Setelah beberapa waktu dan melewati berbagai macam diskusi serta pertimbangan, tertuliskan lah konsep pondok pesantren yang di inginkan dan setelah melalui obrolan panjang, terpilihnya villa milik Doktor A. Arrohanah L.C. M.AG. Yang merasa villa nya kurang bermanfaat jika hanya digunakan untuk orang-orang sekedar istirahat, ngopi lalu pergi. Beliau ingin villa miliknya jauh lebih bermanfaat dengan dijadikan pondok pesantren.

Ustadz Nurul Ain Akyas, yang saat itu belum memiliki kegiatan atau pekerjaan yang terikat dan beliau yang tinggal di Cirebon, akhirnya beliau yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek pesantren ini. Tetapi, pada saat itu Ustadz Nurul Ain Akyas sudah memiliki rencana dan keinginan untuj bekerja di Arab Saudi dengan menjadi penerjemah. Tetapi setelah diyakinkan oleh K.H Abdul Hasib Hasan, akhirnya Ustadz Nurul Ain Akyas memutuskan untuk kontrak 1 tahun menjalani proyek pondok pesantren ini.

K.H Abdul Hasib Hasan memindahkan beberapa anak SDIT untuk menjadi santri pertama di pondok pesantren yang akan dibangun tersebut.Diawal berdirinya pondok pesantren, untuk santri baru pindahan dari SDIT di batas hanya 30 orang dari kelas 3 hingga 6 dengan syarat mempunyai ranking antara 1 sampai 5 di SD nya. Dan syarat selanjutnya, sudah punya hafalan serta bacaannya sudah bagus. Sekitar 30 anak, 15 perempuan dan 15 laki-laki dari 3 SD, SDIT Al- Hikmah, SDIT Iqra’ dan SDIT Nurul Fikri menjadi santri pertama di Pondok Pesantren yang berdiri pada tanggal 20 Juli tahun 1998 ini.

Pesantren ini dibangun dengan motivasi ingin membangun generasi qur'ani, yang memiliki keakraban dan kedekatan dengan Al- Qur'an. Kemudian juga memiliki akidah yang salimah hingga ibadahnya terjaga. Para pendiri pondok ini juga ingin para santrinya menjadi santri yang mempunyai wawasan yang baik dan luas serta terjaga kesehatan rohani juga jasmaninya.

Ditinjau dari segi historisitasnya, munculnya ulama dalam tradisi masyarakat Islam dapat dilacak dari munculnya kelompok masyarakat yang tinggal di beranda Masjid Nabawi, Madinah untuk memperdalam masalah agama yang dikenal dengan sebutan Abl al Suffah, disamping itu ada juga kelompok yang mengkhususkan diri untuk mengkaji tafsir Hadits yang dikenal sebagai Ibnu Abbas semasa Rasulullah Saw., hidup di Madinah. Munculnya kelompok masyarakat pengkaji masalah al Quran dan al Hadits ini kemudian berkembang pada masa Khulafa Rasyidin berkuasa dimana kelompok ini kemudian

terlegitimasikan oleh khalifah untuk mengajar ilmu keagamaan kepada masyarakat di berbagai masjid seperti Kuffah, Basrah, Samarkand, maupun Damaskus.

Adapun semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, bidang keilmuan dan pendidikan kemudian diperluas hingga tafsir, fiqh, ilmu kalam, bahasa Arab, Sastra, Astronomi dan Ilmu Kedokteran. Maka dalam konteks inilah, ulama menjalankan khittah- nya yang murni sebagai pendidik dan pengembang ilmu pengetahuan. Politisasi ulama sendiri terjadi setelah era Khulafa Rasyidin berakhir dengan munculnya berbagai perselisihan antar bani (keluarga) kesukuan Arab yang dulunya bersatu di bawah satu

khalifah. Mereka berperang satu sama lain untuk mendapatkan posisi khalifah dan mengatur wilayah kekhalifahan Islam. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, muncullah berbagai pemahaman mahzab keagamaan yang berbeda pula dimana mahzab itu nanti menjadi identitas kekhalifahannya. Dalam hal ini, ulama kemudian mengalami terpoltisasi dalam sekat-sekat mahzab tersebut sehingga kebebasan berpikir dan diskusi keagamaan kian menjadi terbatas karena intrik politik tersebut. Mahzab keagamaan pun silih berganti mulai dari Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hanbali dalam setiap fase kekhalifahan. Puncaknya terjadi dalam masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghad dimana khalifah memberlakukan kebijakan mihnah terhadap ulama yang tidak sehaluan dengan faham kemakhlukan al Quran yang dipegangi doktrin. Mu'tazilah.

Khalifah sendiri menganut faham Mu'tazilah, teologi ini pun dijadikan sebagai ideologi atau mazhab resmi kekhalifahan. Ulama pun ditugaskan untuk penyebarluasan faham Mu'tazilah pada masyarakat luas demi memperkuat legitimasi kekuasaan yang tidak jarang dalam mensosialisasikan doktrin tersebut digunakan cara-cara kekerasan (Buliet, 1972: 66). Ulama kemudian tampil sebagai bagian dari rezim kekuasaan politik dengan menggunakan pengetahuan teologisnya untuk melegitimasikan kekuasaan rezim. Adanya politisasi ulama inilah yang kemudian menimbulkan adanya dikotomi ulama antara 'ulemayi resmiye (ulama resmi pemerintah) dan 'ulemayi tariq (ulama oposisi) sehingga kian menjauhkan ulama dari panggung pendidikan yang seharusnya menjadi khitta.

Bagian 2

Sang Kiai dalam Lingkaran Politik

A. Selayang Pandang Komunikasi Politik

Komunikasi dan politik merupakan dua konsep yang berbeda. Keduanya berdiri sendiri dan memiliki definisi yang berbeda. Meski demikian, perkembangan teknologi dan gejolak politik internasional menyebabkan perubahan yang sangat masif dalam kemunculan komunikasi politik di era modern. Internet mulai aktif digunakan oleh publik sejak kemunculannya pada tahun 1993. Di bawah naungan American Political Science Association, International Communication Association, dan tiga essai terkait komunikasi politik telah mengisyaratkan pandangan baru dalam ilmu politik yang stagnan pada era sebelumnya. Komunikasi memiliki peran dalam keadaan tertentu yang berdampak pada pemilihan presiden yang mungkin layak untuk dipelajari, seperti menjelaskan bagaimana debat pemilihan presiden sangat bervariasi sedangkan dukungan suara sangat mudah untuk diprediksi. Komunikasi politik adalah proses pertukaran informasi, pesan, dan gagasan antara aktor-aktor politik (seperti partai politik, pemimpin politik, atau kelompok advokasi) dengan tujuan mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat dalam konteks politik. Komunikasi politik bertujuan

untuk mempengaruhi persepsi, memperoleh dukungan, membangun citra, dan mempengaruhi keputusan politik. Komunikasi politik melibatkan penggunaan berbagai strategi dan metode komunikasi, termasuk pidato, debat, iklan politik, media massa, media sosial, pertemuan publik, kampanye, dan hubungan media. Tujuan utama dari komunikasi politik adalah untuk memperoleh dukungan politik, baik dalam bentuk pemilihan umum, pengambilan keputusan politik, pengaruh opini publik, atau dukungan terhadap kebijakan dan program politik tertentu.

Para ahli komunikasi mendefinisikan proses komunikasi sebagai "knowing what he want to communicate and knowing how he should deliver his message to give it the deepest penetration possible in to the minds of his audience." Definisi tersebut mengindikasikan bahwa karakter komunikator selalu berusaha meraih keberhasilan semaksimal mungkin dalam menyampaikan pesan "the deepest penetration possible." Artinya pengertian komunikasi bersumber dari gagasan komunikator yang ingin disampaikan pihak penerima dengan segala daya dan usaha, bahkan tipu daya agar pihak penerima mengena, memahami dan menerima lewat pesan-pesan yang disampaikan. (Tabroni, 2012) Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, politik juga seni, karena sudah berapa banyak kita melihat para politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat dalam hal politik karena memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya.

Sebagai seniman politik, sehingga dengan karismatik menjalankan roda politik praktis. Politik juga dapat dikatakan

sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang memiliki objek, subjek, metodelogi, sistem, terminologi, ciri, teori yang khas dan spesifik serta diterima secara universal di seluruh dunia, disamping dapat diajarkan dan dipelajari oleh orang banyak. (Syafie, 2010) Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi politicos yang artinya kewarganegaraan. Dari kata politicos menjadi politera yang berarti hak-hak kewarganegaraan.

Komunikasi politik adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan sosial. Dunia kehidupan sosial akan menjadi lebih berdinamis kalau komunikasi politik dipahami secara baik dan komprehensif oleh seorang komunikator dalam berkomunikasi. Substansi komunikasi politik dalam politik sangat bergantung pada kekuatan sebuah konsep tentang komunikasi politik dan pendekatannya. Oleh karena itu, pada bagian awal artikel ini, disajikan terlebih dahulu berbagai pemahaman dan konsep tentang komunikasi politik dari berbagai pakar komunikasi politik:

Pertama: Seorang ilmuwan komunikasi politik Indonesia, Maswadi Rauf, berpendapat bahwa: Komunikasi Politik adalah sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi selalu bercirikan politik dan selalu berkaitan langsung dengan kekuasaan politik di dalam sebuah negara, pemerintahan dan juga aktivitas dari seorang komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik itu

sendiri. Dalam konteks ini komunikasi politik dapat ditilik dalam dua dimensi utama, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan komunikasi sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik bercirikan penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan oleh actor politik kepada semua pihak lain. Kegiatan ini dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial sehari-hari, karena itu kegiatan ini disebut kegiatan empirik. Komunikasi politik disebut sebagai kegiatan ilmiah kalau salah satu kegiatan politik selalu berkaitan langsung sebuah sistem politik di dalam sebuah negara.

Kedua: Seorang pakar hukum; Rusadi Kantaprawira berpendapat bahwa: Komunikasi Politik adalah penghubungan pikiran politik yang terjadi dan hidup di dalam suatu masyarakat secara langsung, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, instansi ataupun sektor-sektor kehidupan politik sebuah pemerintahan. Dalam konteks ini, Rusadi secara ketat melihat aspek komunikasi politik dalam perspektif kegunaannya.

Ketiga: Bagi Astrid S. Soesanto, mengemukakan secara cerdas bahwa komunikasi politik ialah komunikasi yang terus diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh yang terus terjadi sedemikian rupa, sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat dan bisa mengikat seluruh netizen lewat suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh institusi politik.

Keempat: Bagi Roelofs dan Barn Lund, komunikasi politik adalah sebuah aktivitas yang menyerukan atau membicarakan seluruh kegiatan politik yang terjadi dalam problem sosial kemasyarakatan. Jadi tepatnya adalah aktivitas politik yang juga sudah terjadi politisasi. Dalam sebuah komunikasi politik selalu terdapat unsur-unsur komunikasi yang bersentuhan langsung dengan politik.

Pertama adalah: Sumber. Kata kunci dalam hal ini adalah pembuat atau pengirim informasi. Semua peristiwa komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sosial selalu melibatkan sumber sebagai pembuat informasi atau pengirim informasi itu sendiri. Contoh : lembaga atau partai politik, lembaga apa pun atau organisasi apa pun. Dalam komunikasi, sumber sering juga disebut sebagai pengirim atau sender atau komunikator.

Kedua adalah: Pesan. Sebuah pesan dalam dunia komunikasi, Pesan yang dimaksud adalah sebuah proses yang disampaikan oleh seorang pengirim kepada seorang penerima. Dalam konteks ini, isi dari pesan, dapat berupa sebuah informasi atau pun ilmu pengetahuan, atau berupa hiburan, atau pun nasehat, atau pun juga berupa sebuah propaganda yang hebat dan handal.

Ketiga adalah: Media. Dalam sebuah komunikasi, media yang dimaksud di sini sebagai alat atau sarana yang selalu digunakan untuk menyampaikan pesan dalam konteks memindahkan sebuah pesan dari sumber atau komunikator kepada penerima. Sebagai contoh: Setiap pancaindra yang dimiliki oleh komunikator tetap dianggap sebagai media komunikasi.

Keempat: Penerima. Penerima dalam sebuah komunikasi

adalah pihak yang akan menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber atau pembuat informasi atau komunikator. Penerima ini bisa saja secara individual, pribadi atau secara kelompok kolegial bersama orang lain. Jadi bisa dalam bentuk kelompok, bisa dalam sebuah partai politik atau pun di dalam sebuah negara. Dalam proses sebuah komunikasi.

Kelima: Pengaruh atau Efek. Efek atau Pengaruh adalah perbedaan kondisi antara apa yang dipikirkan penerima, apa yang dilakukan penerima, dan apa yang dirasakan oleh penerima pada saat sebelum dan sesudah menerima sebuah pesan, entah itu terjadi secara pribadi orang per orang atau terjadi secara bersama dan berkelompok. Dalam konteks ini, pengaruh atau efek, bisa terjadi pada sikap, perilaku dan juga pengetahuan si penerima pesan. Dalam konteks ini juga, pengaruh atau efek dapat juga diartikan sebagai perubahan atau penguatan keyakinan dari si penerima pada pengetahuan, tindakan dan juga perilaku yang dilihat sebagai akibat penerimaan sebuah pesan.

Keenam: Tanggapan Balik. Sebuah tanggapan balik sering disebut dengan umpan balik yang tetap dilihat sebagai salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari si penerima pesan. Dalam konteks ini tanggapan balik juga bisa berasal dari unsur lain seperti media dan pesan, walaupun pesan tersebut belum sampai pada si penerima pesan. Misalnya: Sebuah konsep surat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan, mengalami gangguan atau hambatan sebelum pesan itu sampai kepada tujuannya.

Ketujuh : Lingkungan. Lingkungan atau juga kondisi

adalah salah satu elemen penting dalam komunikasi. Kunci utama dalam hal ini adalah lingkungan tetap menjadi faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya sebuah komunikasi yang terjadi. Faktor lingkungan bisa terjadi dalam lingkungan yang berbeda seperti lingkungan psikologis, lingkungan sosial budaya, lingkungan fisik dan juga termasuk di dalamnya yang penting adalah dimensi waktu yang tepat Pembahasan tentang komunikasi politik tidak semudah dengan membicarakan atau membahas tentang gerakan politik. Kesulitan itu muncul karena terdapat dua konsep atau dua varian penting yang mengusung disiplin ilmu ini, yakni konsep "komunikasi" dan "politik". Dengan demikian: Komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisiplinar yang dibangun atas berbagai macam ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Komunikasi politik itu sendiri merupakan wilayah permainan dan dimeriahkan oleh persaingan berbagai teori, berbagai pendekatan, berbagai agenda dan konsep dalam membangun jati diri.4 Apa yang dimaksud dengan komunikasi politik? Bertolak dari konsep komunikasi dan konsep politik yang telah diuraikan pada bagian awal,upaya untuk mendekati pengertian tentang apa itu komunikasi politik.

Komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi beraneka pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain yang bertujuan untuk membuka wawasan atau pola berpikir, yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak yang menjadi target dari politik itu sendiri. Sosiolog politik: Michael Rush dan Philip Althoff mengargumentasikan

bahwa komunikasi politik sebagai sebuah proses di mana informasi politik yang relevan dilanjutkan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem- sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Hal seperti ini terjadi secara berkesinambungan dan dapat mencakup pola pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompokkelompoknya pada semua level atau semua tingkatan.

Komunikasi politik merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang dapat menentukan sosialisasi politik dan sekaligus dapat menentukan partisipasi politik. Dalam hal ini komunikasi politik dapat menjadi corak perilaku insan politik dan penentu utama dalam politik. Dengan demikian; Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan langsung dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah di dalam sebuah negara. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antar dua institusi yakni "yang memerintah" dan "yang diperintah." Inilah hal penting dalam komunikasi politik.

Komunikasi politik menjadi sangat dinamis dalam dunia kehidupan konkrit sehari-hari. Dalam setiap aktivitas manusia selalu membutuhkan komunikasi. Dapat dikatakan bahwa hal komunikasi adalah suatu hal yang sangat mutlak dalam kehidupan konkrit setiap manusia. Segala hal apa pun selalu membutuhkan komunikasi dan kadang-kadang manusia bisa dan sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Sebagai contoh: Siapa pun bisa berbicara tentang korupsi dalam komunikasi politik. Dalam komunikasi yang dibicarakan tentang politik, kadang

diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik, dan sering juga dikaitkan sebagai komunikasi kampanye pemilu *(election campaign)* karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye.

Komunikasi politik memiliki sebuah relasi yang erat dan istimewa karena berada dalam wilayah politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang fundamental. Komunikasi politik tetap tersambung dengan semua bagian dari sistem politik sehingga aspira dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Seorang ilmuwan komunikasi politik: McNair memberikan konsep penting tentang komunikasi politik sebagai berikut:

Pertama: Semua bentuk komunikasi yang digunakan oleh politisi dan actor politik atau pelaku politik lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kedua: Komunikasi yang disampaikan oleh aktor atau pelaku politik non politisi seperti pemilih (voters) dan kolomnis.

Ketiga: Komunikasi mengenai para aktor atau pelaku politik dan aktifitasnya, seperti pada berita, editorial, dan bentuk lainnya dari media politik.

Pemahaman tentang konsepsi politik menurut McNai dalam bukunya "An Introduction to Political Communication", (1995:4-5) menjelaskan tiga elemen kunci yakni:

Pertama: *Political organizations* yang terdiri elemen penting yakni partai politik, organisasi publik, pressure group, terrorist organizations dan governments.

Kedua: Media. Yang merupakan cannal yang tepat atau sesuai dengan tujuan pemberitaan agar pesan dapat tersampaikan secara baik. Ketiga: Masyarakat (citizens). Bagi McNair semua elemen komunikasi politik dapat dipergunakan oleh politikus politik dalam pelaksanaan aktivitas politiknya. Peran komunikasi berlangsung melalui pemanfaatan saluran komunikasi politik secara efektif dan efisien dalam beragam bentuk dan level dalam kehidupan sosial. Media massa merupakan saluran dan instrumen komunikasi yang paling menarik dan berpengaruh dalam proses politik.

Misalnya pemilu Presiden tahun 2019 antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dimana kampanye di lakukan melalui berbagai media, termasuk di dalamnya media baru atau internet. Selalu terlihat oleh public; Kampanye dan iklan politik, hampir setiap hari selalu mengkomunikasikan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, menjadi Presiden.

Komunikasi politik dalam proses politik, sangat terbuka terjadinya konflik politik. Konflik politik dalam politik merupakan kekuatan atau ‘energi’ baru bagi politik yang memberi peluang dalam pengembangan baru, penyelesaian problem dan penambahan nilai dan konsep sosial politik. Konflik berlangsung sebagai akibat dari ketidaknyamanan dari para pihak mengenai proses politik . Situasi konflik dapat menjadi kekuatan besar dalam proses peningkatan nilai-nilai politik yang terdapat di dalam suatu masyarakat. Konflik yang muncul tidak bisa dihindari, seharusnya dimanage secara baik dalam komunikasi politik yang baik pula.

Dalam mengatur konflik, tentunya hal utama yang perlu

diperhatikan adalah peran utama dari otoritas formal dari sebuah partai misalnya atau pun komunikator politik yang memiliki kewenangan formal dalam suatu masyarakat. Para penguasa yang tidak memiliki kekuasaan tidak akan pernah mampu mengatasi masalah-masalah yang sewaktu-waktu muncul dalam suatu masyarakat. Konsekuensinya, ia dengan sendirinya akan kehilangan otoritas formalnya dan dianggap tidak berfungsi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Dalam komunikasi politik, isi pesan politik lebih banyak menggunakan media daripada menggunakan komunikasi publik seperti kampanye atau pun juga orasi. Isi pesan politik juga berkaitan langsung dengan agenda setting media yang selalu berasal dari pesanan kelompok atau pesanan golongan tertentu, dalam hal ini sebuah propaganda juga dapat bermain didalam pesan tersebut yang bertujuan membentuk berbagai persepsi baru di mata public. Pesan politik ini bisa mempengaruhi proses kesuksesan sebuah partai politik ketika bersaing untuk merebut suara menuju kekuasaan.

Dalam komunikasi politik, salah satu unsur yang paling penting adalah "pembicaraan." Menurut David VJ Bell (dalam Nimmo, 1989), terdapat tiga jenis pembicaraan yang selalu mempunyai kepentingan politik, yaitu:

Pertama: Pembicaraan Kekuasaan. Pembahasan tentang kekuasaan merupakan pembicaraan yang berurusan dengan orang lain dan selalu mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji. Bentuknya yang kelihatan secara khas adalah "jika anda melakukan X, saya akan melakukan Y". Tentang dukungan dan

janji dalam hal ini adalah bahwa ’saya’ mempunyai kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman yang disebut dengan kekuasaan koersif. Untuk mempengaruhi orang lain, bisa dilakukan dengan ancaman dan janji. Bagaimana pun, kunci pembicaraan kekuasaan ketika seorang pejabat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan janji ataupun ancaman. Ancaman dan janji terletak di kutub yang bersifat diferensial dan selalu berbeda. Meskipun demikian, intinya adalah pembicaraan kekuasaan. Berdasarkan penelitian, kebanyakan janji yang terlihat adalah bohong, dan bohong adalah suatu kekerasan yang disampaikan dengan cara halus dan sangat lembut. Dalam hal ini, kekerasan termasuk dalam kategori ancaman, sehingga termasuk dalam bentuk kekuasaan.

Kedua: Pembicaraan Pengaruh. Banyak elemen yang termasuk dalam pembicaraan pengaruh merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara seperti nasihat, dorongan, permintaan, dan peringatan. Konsep pemikirannya adalah “Jika anda melakukan X, maka akan terjadi Y.” Kunci pembicaraan pengaruh adalah bagaimana si pembicara berhasil memanipulasi persepsi atau pengharapan orang lain terhadap berbagai kemungkinan untuk mendapat untung atau pun mengalami kerugian. Janji dan ancaman yang merupakan alat tukar pada komunikasi atau pembicaraan kekuasaan, pada pembicaraan pengaruh alat-alat tersebut bisa diganti dengan nasihat, dorongan, dan permintaan. Dengan kata lain, pembicaraan pengaruh lebih bersifat ajakan, tetapi masih bersifat hukum dalam batasan-batasan yang wajar.

Ketiga: Pembicaraan Otoritas. Konsep kunci dalam konteks pemberian otoritas adalah pemberian perintah. Pembicaraan atau pernyataan otoritas, misalnya dengan katakata “Lakukan!” atau “Dilarang!”. Dua kata tersebut adalah sebuah pernyataan otoritatis. Suara seorang penguasa yang sah adalah suara seorang yang mempunyai otoritas dan memiliki hak untuk selalu dipatuhi. Pembicaraan autoritas adalah pemberian perintah. Afirmasi bentuk yang khas dalam hal ini adalah “ lakukan X” atau “Dilarang melakukan X”. Yang dianggap sebagai penguasa yang sah adalah suara outoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi. Problem pembicaraan otoritas ini adalah secara hitam-putih dalam melihat sesuatu. Ketiga pembicaraan politik di atas diterapkan pada situasi yang selalu berbeda. Bila mensyaratkan kompromi, menggunakan pembicaraan pengaruh. Sedangkan pada pembicaraan otoritas, tindakan tegas menjadi kriteria yang utama. Adapun pembicaraan kekuasaan, digunakan untuk mengancam hal-hal yang membahayakan negara.

Komunikasi dan politik memiliki kaitan yang erat. Hubungan ini bisa jadi terwujud dalam pernyataan, misalnya “Salah satu kegiatan politik adalah melakukan komunikasi” atau “Komunikasi dapat digunakan untuk mencapai satu tujuan politik tertentu”. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dengan mudah menemukan sejumlah aktivitas komunikasi yang terjadi dengan latar belakang kepentingan atau tujuan politik. Sebagai contoh, seorang walikota yang memberi sambutan pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh yang lain, upaya

pengenalan visi dan misi calon presiden yang salah satunya dilakukan melalui debat politik atau perbincangan di masyarakat tentang kontroversi kebijakan baru yang diberlakukan suatu pemerintah daerah.

Untuk mempermudah pemahaman tentang komunikasi politik, ada baiknya Anda menyegarkan kembali ingatan dan pemahaman Anda tentang dua bidang ilmu yang erat kaitannya dengan komunikasi politik. Kedua bidang ilmu yang perlu Anda kenali kembali ini adalah ilmu komunikasi dan ilmu politik. Menjadi suatu hal yang akan lebih ideal lagi, bila Anda dapat membaca ulang buku-buku tentang ilmu komunikasi dan ilmu politik, dan kemudian mencoba merangkaikannya.

Berkenaan dengan kampanye politik saat berlangsungnya pesta demokrasi “Pemilihan Umum” Ustadz Nurul Ain Akyas ,mengatakan bahwa dalam berkampanye beliau objektif “menyampaikan visi politik” dan tidak pernah berjanji kepada masyarakat, apalagi saat ia terjun ke dunia politik tidak dengan modal yang besar.

Ustadz Nurul Ain Akyas ,mengatakan visi politik yang disampaikan pada saat kampanye adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selama ini masyarakat tidak memahami ajaran Islam secara utuh, bahwa politik itu bagian dari Islam. Bukan orang berpolitik lalu mempolitisir Islam. Beliau mengatakan perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam politik. Jika masyarakat aspirasi politiknya diberikan kepada orang yang tidak memiliki akhlak, maka akan melahirkan pemimpin yang jelek dan tidak berakhlak. Allah memerintahkan agar memilih

pemimpin yang baik dan jangan dipilih pemimpin yang musyrik, pilih yang dapat mengantarkan masyarakat kepada kebaikan. Seorang masyarakat jika memilih pemimpin yang baik itu adalah kerja ibadah. Kerja-kerja politik yang dilakukan dalam rangka menegakkan Islam secara utuh, itu pun bagian dari ibadah.

Ustadz Nurul Ain Akyas ,dalam berkampanye lebih menyuarakan dan mengedepankan konsep "pembangunan yang berkeseimbangan", jika pembangunan fisik material tidak diimbangi dengan pembangunan mental spiritual, maka negara akan hancur. Pernyataan yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya perbedaan isu yang dijual para Ustaz pada saat kampanye politik, paling tidak ada tiga isu, yaitu:

1. Menjual isu "kejujuran" dan "tidak mengobral janji" karena memang berangkat dari modal yang tidak besar;'
2. Mengangkat isu perlunya"pembangunan berkeseimbangan" antara fisik material dengan mental sepiritual, karena pembangunan yang dilakukan selama ini hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, sehingga melahirkan berbagai kehancuran diberbagai sektor kehidupan; dan
3. Perlunya "melibatkan peran serta masyarakat" dalam politik. Jika masyarakat aspirasi politiknya diberikan kepada orang yang tidak berakhlak, maka akan melahirkan pemimpin yang jelek dan tidak berakhlak. Jika masyarakat memilih pemimpin yang baik itu adalah kerja ibadah. Kerja-kerja politik yang dilakukan dalam rangka menegakkan Islam secara utuh, itu pun bagian dari ibadah.

Memang saat kampanye pemilu beliau berusaha

mempengaruhi massa pemilih berusaha menjelaskan partainya yang menjadi pilihan. Dengan memberikan pemahaman bahwa maka partainya berjuang menyuarakan amanat hati nurani rakyat, *al-amar bi al-ma'rufi wa an-nahy 'an al-munkari* (memberi motivasi untuk berakhlak luhur, membela kebenaran, dan memerangi kemungkaran), menekankan etika politik yang jujur dan adil, berorientasi kesejahteraan rakyat, serta berjiwa keselamatan dunia dan akhirat, kiranya yang patut dipilih. Bukan partai yang penuh hiasan ayat suci, namun hampa dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Rakyat membutuhkan bukti, bukan janji.

B. Dinamika Kiai dalam Lingkaran Politik

Bahwa tidak ada masalah Kiai masuk di politik praktis, sebab dengan adanya Kiai paling tidak aktifitas kepartaian terkontrol dari pesan moral Kiai yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah kemungkaran. Di dalam masyarakat Islam, Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohannya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (waratsatul al- anbiya). Tidak mengherankan jika Kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagaman, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis Kiai, khususnya dalam aspek kehidupan politik di Indonesia, termasuk dalam proses politik itu sendiri.

Perbedaan-perbedaan dalam status sosial, seringkali lebih rumit dan terkadang tumpang-tindih. Namun kehidupan sosial,

sering ditandai oleh berjalannya norma-norma yang membedakan antara yang tua dan yang muda, yang kaya dan yang miskin, pimpinan dan bawahan, Kiai dan santri, dan seterusnya. Sistem norma itu, bekerja secara efesien. Sesuai dengan konsep perbedaan dalam status sosial, dalam konteks ini, para Kiai-terutama di daerah-daerah pedesaan mereka menerima penghormatan lebih, yang tidak dimiliki oleh elite lokal yang lain. Sebagai pemegang otoritas keagamaan, otoritas dan kekuasaannya dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hubungan sosial saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam dunia politik. Pengaruh seorang Kiai tentu saja begitu luas terutama dikalangan umat Islam yang sering mengikuti langkah-langkah politiknya.

Keberhasilan Kiai dalam memimpin masyarakat, menjadikannya semakin tampak sebagai orang yang berpengaruh, termasuk dalam ranah politik, sehingga mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi atau tanggapan emosional para pengikutnya. Untuk itu juga, artikel ini mencoba membidik hubungan Kiai dengan situasi sosial dan politik. Terlebih dengan kian maraknya figur Kiai yang akan dan telaH melibatkan diri di arena politik praktis. Adapun bidikan penulis, lebih fokus pada perspektif ilmu-ilmu sosial.

Keterlibatan mereka dalam dunia yang sering di sebut wilayah ”abu-abu” itu, menjadi menarik bukan hanya untuk diperbincangkan tetapi juga untuk dipertanyakan; ’’Gerakan moral, atau Politik?’’ dua pertanyaan bertolak belakang diatas, masih menunggu jawaban atas kian banyaknya pemuka agama yang merangkap jabatan. Sebagai Kiai plus politisi Keberadaan

Kiai dalam dunia politik, sungguh kondisi yang demikian sebenarnya sangat kontradiktif dengan keseharian para Kiai terutama Kiai-Kiai yang di pesantren dengan nuansa Islami yang sebelumnya selalu diwarnai dengan mengajar kitab-kitab keIslaman dan memberikan pengajian.

Namun kebebasan berpolitik acap kali dijadikan alasan para politisi untuk memperkuat keberadaan partai-partai politik, dengan merangkul para Kiai untuk masuk dalam partainya. Baik itu partai yang berazazkan islam ataupun partai nasionalis. Semua itu terjadi, erat kaitannya dengan kejadian-kejadian pada masa lalu. Pada masa orde lama misalnya, dengan rezim demokrasi terpimpinnya Soekarno, sudah terjadi manipulasi peran serta masyarakat untuk kepentingan politik dan terhegemoni sebagai alat legetimasi politik. Pengekangan kebebasan berpendapat, berserikat, dan ruang gerak dalam politik sering diberedel para penguasa pada saat itu. Yang pada akhirnya mengakibatkan kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat di curigai sebagai kontra revolusi.

Fenomina tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa di Indonesia pada masa Soekarno-pun telah mengalami kecendrungan untuk membatasi gerak dan kebebasan publik dalam mengeluarkan pendapat. Setelah datangnya masa orde baru pun, pengekangan demokrasi dan penindasan hak-hak asasi manusia kian terbuka, seakan menjadi tontonan gratis yang bisa dinikmati oleh siapapun, bahkan untuk segala usia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh kasus yang terjadi pada masa orde baru. Misalnya, kasus pembredelan lembaga press pada waktu itu, seperti; Aji,

Detik, Tempo dan yang lain. Fenomina itu merupakan fregmentasi kehidupan yang mengekang kehidupan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya di muka publik.

Karenanya, disaat kran reformasi dan otonomi daerah dibuka, yang juga diikuti perubahan dalam undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum, sontak mereka yang gandrung politik mulai dan sudah berlomba-lomba untuk membuat partai dan para calegnya yang sebagian besar melibatkan figur Kiai. Dalam konteks permasalahan diatas, Layaknya air dalam satu waduk yang sudah penuh, kemudian dibuka pintu airnya, maka yang akan terjadi secara otomatis air tersebut akan tumpah ruwah menuju ruang-ruang kosong. Dilihat dari perspektif lain, masih dalam konteks Kiai dan politik, bagi mereka yang berpandangan tidak sepakat Kiai berpolitik, sangat menyayangkan atas keterlibatan para Kiai dalam politik praktis, yang sebenarnya dianggap bukan gerakan utama bagi seorang pemuka agama.

Lebih ironis lagi, jika seorang Kiai hanya dijadikan ”kuda tunggangan” para politisi yang hanya berebut kursi kekuasaan. Karena politik, sungguhpun sesamar mungkin dikemas, tetap saja menjadi, ”a selfish grab for power, glory and riches” (suatu perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri). Secara singkat, kekuasaan dalam realitasnya; suatu perebutan (kuasa, tahta, dan harta). Hal ini dapat kita lihat dihampir setiap perhelatan politik. Baik itu politik lokal, ataupun ditingkat nasional. Pada titik ini, integritas para politisi itu tengah dipertaruhkan, jika para Kiai -politisi kian terbawa arus politik praktis seperti yang banyak terjadi sekarang, tentu sudah bukan

rahasia lagi, bahwa kondisi politik saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Citra politik di Indonesia yang semakin kotor, nyaris tak terbantahkan. Dunia politik seakan telah menjadi sisi lain dan dunia tersendiri dari kehidupan normal di tengah masyarakat. Orang masuk partai, terlebih yang sudah menjadi anggota dewan, niatnya bukan lagi untuk memperjuangkan suara rakya tentu hal ini tidak semua namun yang terjadi malah sebaliknya, tidak sedikit mereka yang menganggap menjadi anggota dewan itu tidak lebih dari sekedar mencari kerja. Sehingga dengan sendirinya yang ada dibenak mereka, hanya berpikir untung dan rugi, bukan lagi khidmah. Itulah dinamika politik, dimana pelaku politik didalamnya terdapat multikarakter manusia. Demokrasi yang selama ini sering di dengung-dengungkan, sejatinya mampu mendorong seluruh lapisan masyarakat kearah yang lebih baik, namun pada kenyataanya, seperti bunyi pepatah, masih ”jauh panggang dari api”. Jargon untuk membela rakyat, demi kepentingan bangsa, perjuangan, demokrasi, terasa tepat hanya disampaikan ketika kampanye politik, dan terasa hambar dalam pembuktian.

Terkait hal itu, secara gradual keadaan yang demikian telah menyeret eksistensi Kiai pada kondisi yang serba dilema. Artinya, pada satu sisi Kiai harus melakukan gerakan moral, namun disisi lain, Kiai harus bergelut dengan aktifitas politik praktis, sebagai tugas sampingan. Sehingga dengan sendirinya Kiai akan kesulitan membagi waktunya secara proporsional dalam melakukan gerakan moral dan sekaligus gerakan politik. Akibatnya tidak heran jika

gerakan moral Kiai mengalami set back. Misalnya, santri kurang terurus yang disebabkan para Kiai sudah tidak lagi bisa fokus terhadap pendidikan para santrinya. Disinyalir, selama ada partai-partai, dan para Kiai semakin aktif didalamnya, maka kredibilitas Kiai menjadi semakin luntur dan kabur.

Hal ini akan berdampak pada keberadaan masyarakat yang sering mengikuti langkah para Kiai-politisi tersebut---utamanya bagi masyarakat ditingkat bawah---jika keberadaan mereka sudah tidak dapat dijadikan panutan dalam kehidupan umat. Umat menjadi bingung dengan arah para Kiai mereka. Pasalnya, masing-masing Kiai seolah menjadi makelar dagangan yang bernama ”tahta”. Mereka mengabaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya dalam kehidupan sosialpolitik. Dalam kaca mata realita, yang terjadi sejauh ini, keberadaan para Kiai dalam dunia politik, mulai dan sudah terkotak-kotak. (ada Kiai yang masuk tingkatan khos, Kiai sepuh, Kiai poros langitan, dan sebagainya).

Akibat dari dukung-mendukung partai politik, tidak jarang silaturrahmi menjadi renggang hanya karena masing-masing berbeda visi dan dukungan politiknya. Hal lain yang mungkin terlupakan, adalah bahwa dengan masuk pada salah satu partai politik, menurut hemat penulis, secara sederhana dapat dipastikan para Kiai itu sulit untuk bisa diterima semua kalangan. Terlebih bagi mereka yang berbeda pilihan politiknya. Hal itu dikarenakan para Kiai -politisi itu dianggap sudah menjadi milik pemerintah, partai politik, dan kalangan masyarakat tertentu, yang pada akhirnya tidak mungkin lagi diraih masyarakat secara umum.

Dalam konteks ini, bolehlah kalau dikatakan Kiai politisi itu hanya menempatkan kharismanya sebagai bargaining politik saja. Sosok Kiai bagi masyarakat merupakan indikator penting dalam kelangsungan hidup keberagamaan masyarakatnya.

Kiai tidak hanya sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan saja, namun juga sebagai tempat untuk mencurahkan berbagai keluh kesah dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di desa biasanya Kiai diminta solusi dari berbagai persoalan, seperti masalah keluarga, pendidikan, jodoh bahkan memilihkan waktu untuk memulai suatu pekerjaan. Tapi ada juga sebagai asumsi, bahwa penyebutan Kiai cenderung disandarkan pada dunia pesantren yang berbasis tradisional dan. Karena kemampuan agamanya yang cukup tinggi, maka Kiai ditempatkan sebagai sosok "guru" baik dalam ilmu bathin (esoteric) maupun ilmu zhahir (eksoterik). Jika dilihat dari sejarahnya, bahwa gelar Kiai memang tidak mudah untuk didapat. Dalam bahasa jawa gelar Kiai memiliki asal usul dalam tiga jenis yang berbeda.

Pertama: Kiai merupakan gelar kehormatan bagi sesuatu yang dianggap keramat,

Kedua: gelar kehormatan untuk orang yang sudah tua,

Ketiga: gelar untuk seorang yang ahli agama Islam atau memiliki pesantren dan mengajar kitab klasik.

Meskipun dalam perkembangan selanjutnya gelar Kiai mulai melebar dan dapat dimiliki siapapun selama masyarakat setempat mau mengakuinya dan sang Kiai bisa memenuhi kriteria sebagai sosok Kiai apalagi mampu menjangkau apa yang tak terjangkau oleh orang awam. Kedudukan sosial Kiai dianggap

cukup tinggi, sehingga Kiai termasuk elit agama dan tokoh agama yang eksistensinya selalu diperhitungkan. Sebagai tokoh agama, Kiai berada dalam posisi yang memiliki kharisma akibat hubungan strata sosial yang tetap dipertahankan dalam komponen masyarakat.

Suzanne Keller memposisikan tokoh sebagai elit penentu sekaligus sebagai obyek sosial, sehingga berada dalam kondisi tiga hal:

Pertama, mempunyai wewenang dan pengambil keputusan, *Kedua,* sebagai pendukung kekuasaan moral, *Ketiga*, sebagai orang yang terkenal, berhasil dan berderajat.

Maka seorang tokoh dituntut untuk berhasil dalam mengembangkan suatu citra umum yang memudahkan hubungan timbal balik yang bersifat simbolis antara tokoh agama dengan masyarakat. Tokoh agama dapat juga ditempatkan sebagai kolektif model dan cermin dari ambisi, harapan dan pergolakan masyarakat.

Seperti: Hiroko Horikosi (1978) yang membedakan Kiai dengan ulama dan memandang Kiai sebagai agen perubahan sosial, sehingga Kiai banyak bermain pada tataran kultural. Pada akhirnya Kiai ditempatkan sebagai pemelihara sistem, bukan pencipta sistem dan Kiai sebagai perantara (broker) dalam menghubungkan masyarakat modern dengan pertahanan sistem pertahanan tradisional. Maka Horikoshi memandang bahwa Kiai menjadi tolak ukur dalam menunjukkan kewaspadaan terhadap prinsip otoritas, sehingga bila terjadi sebuah kemerosotan dalam hal apapun maka Kiailah yang menjadi penentram.

Sementara Geertz (1960) menyoroti Kiai sebagai makelar

budaya (cultural brokers), demikian juga Martin Van Bruinessen (1995) yang menggandengkan kiprah Kiai dalam dunia tarekat (persaudaraan mistik Islam). Zamakhsyari Dhofier (1982) juga mengkaji tentang pandangan hidup Kiai dalam tradisi pesantren. Dan masih banyak lagi belakangan bermunculan kajian dan penelitian seputar kiprah Kiai terutama dalam pentas politik maupun sosial keagamaan. Peran dominan Kiai dalam proses perkembangan keagamaan tersebut kemudian membentuk sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat unsur yang tidak terpisahkan, saling mengandaikan, saling membutuhkan dan membangun suatu keseluruhan sehingga sampai pada keseimbangan yang cenderung untuk mempertahankan diri.

Maka analisa teori fungsional Parson sangat relevan dengan menggunakan konsep relasional atau peranan, sebagaimana diuraikan oleh K. J.

Veeger yang mengkaji teori fungsionalisme Talcot Parson dengan mengintrodusir ke dalam dua ciri khas, yaitu: . Konsep fungsi yang dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan

ketahanan system social. Konsep pemeliharaan keseimbangan sebagai ciri utama dari tiap-tiap sistem sosial. Maka dalam analisis Sosiologis, menurut Weber (1968) sebagai kacamata fakta sosial, kepemimpinan tokoh agama sesungguhnya adalah kepemimpinan kharismatik yang berporos pada personal leadership.

Dalam konteks ini Kiai adalah patron bagi umatnya (client) dalam sebuah relasi yang paternalistik. Kompetensi Kiai dalam

bidang agama menempatkannya sebagai pemegang otoritas suci agama. Fatwa dan nasehat Kiai senantiasa dijadikan sebagai preferensi sosial-politik yang dipatuhi umatnya. Bahkan dengan otoritas kuasa dan moral yang dimilikinya, Kiai mampu menggerakkan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Bagian 3

Sang Kiai Berpolitik

Pentingnya Politik

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Sedangkan penegrtian politik sendiri adalah usaha untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam Islam, politik kaitanya dengan hukum atau al-hukm. Dalam Islam politik adalah suatu sistem yang dijalankan berdasarkan hukum Allah yang terkandund di dalam Al- Quran. Dalam substansi politik Islam hukum-hukum Allah dapat ditegakan. Menurut (Dhofier,1994) Kekuatan Kiai terletak pada dua hal, yaitu memiliki perasaan kemasyarakatan yang dalam dan selalu berlandaskan kesepakatan bersama. Salah satu faktor yang membentuk kebesaran pengaruh Kiai adalah faktor teologis karena dikalangan muslim. Kiai dipandang sebagai pewaris para nabi.

Makna para pewaris nabi tersebut memberikan legitimasi bagi Kiai untuk menjalankan berbagai tugas, diantaranya mendidik umat dibidang agama dan melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat, memecahkan problem sosial yang terjadi di masyarakat, serta menjadi cultural brokers atau bahkan sebagai agen perubahan sosialdalam kehidupan masyarakat (Zainuddin, 2019), termasuk dalam politik (Faridl,

2007). Kiai yang awalnya hanya seorang pengasuh pesantren dan panutan masyarakat dalam persoalan agama, pada akhirnya pun terlibat dalam persoalan politik. Hal ini tak lepas dari aset besar yang dimiliki oleh seorang Kiai, yang berupa kharisma, wibawa, pengetahuan agama, dan massa yang cukup besar baik di lingkungan pesantren dan masyarakat.

Kiai yang mempunyai pengaruh tersebut kemudian memiliki posisi strategis dalam konstalasi politik. Banyak Kiai yang terlibat dalam politik praktis, baik langsung maupun tidak langsung. Kiai langsung terlibat dalam politik, seperti menjadi pengurus partai politik, juru kampanye, ataupun sebagai anggota legislatif. Adapun secara tidak langsung, Kiai hanya memberi dukungan kepada partai politik maupun dukungan kepada calon baik legislatif maupun eksekutif (Haris & Dardum, 2021).

Ada banyak faktor yang membuat posisi sosial Kiai menjadi suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Misalnya menunjukkan kekuatan Kiai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Kedua, faktor kekuataan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya, Kiai dipandang memiliki kemampuan untuk menggerakan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik.

Oleh sebab itulah maka saat ini penting untuk diketahui

secara maksimal bagaimana seharunys peran serta Kiai dalam kancah perpolitikan Indonesia. Sebab dengan terbukanya demokrasi seluas mungkin saat ini maka tidak mengherankan banyak sekali Kiai yang mulai terjun dalam pusaran tersebut. Hal ini tentunya bukan masalah, melainkan bisa menjadi solusi jitu sebab prinsip berpolitik sebagai warga Negara juga terus menjadi pelajaran penting setiap Kiai di pesentren.

Lantas bagaimana seharunys sikap dan cara seorang Kiai berpolitik? Salah satunya mungkin bisa diambil dari beberapa pelajaran penting kisah hidup Kiai yang sukses berpolitik mulai dari Gus Dur hingga mbah Maimoen Zubair. Meski banyak sekali keputusan dan sikap politik dua Kiai kharismatik yang belum bisa semua orang pahami, namun jejak langkah dan dawuhnya tentu masih bisa menjadi pelajaran penting bagaimana seharunya para Kiai berpolitik.

Menurut jurnal Arafah, Nawal Nur yang berjudul "KH Maimun Zubair Gagasan dan Kiprahnya dalam Politik Islam di Indonesia." *Journal on Education* 5.1 (2022): 609-626, kepemimpinan yang dilakukan oleh Mbah Moen baik perannya sebagai tokoh panutan di masyarakat maupun di partai politik, telah mengedepankan nilai- nilai dan prinsip yang diajarkan oleh Islam. Ia selalu berusaha untuk mengoptimalkan amanahnya baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai utusan pemerintah.

Baginya, urusan politikpun menjadi hal yang sangat penting kaitannya dengan bukti cinta kepada tanah air. Dalam menjalankan kiprah di bidang pemerintahan, Mbah Moen

menganggap tugas tersebut adalah salah satu bentuk pengabdian dalam melaksanakan ajaran Islam. Dengan berpedoman pada al-qur‘an surah Ali Imron: (3): 104 (Muazaroh & Subaidi, 2019).

Bagi Mbah Moen, lafal “Minkum” yang artinya di antara kamu memberikan isyarat bahwa hendaknya ada seseorang di antara kamu maupun kelompok yang berjuangdengan gigih menerapkan amar ma‘rufnahi munkar. Mbah Moen menilai bahwa partai PPP sebagai satusatunya partai yang memegang prinsip amar ma‘ruf nahi munkar. Hal ini dibuktikan dengan adanya ideologi PPP yang senantiasa mendukung umat Islam secara keseluruhan.

Bagi Mbah Moen, berpolitik harus diniatkan sebagai bentuk pengabdian terhadap agama dan negara.Hal ini sangat sejalan dengan pemikiran Imam Ghazali dalam karyanya At-Tibr Al-Masbuk Fi Nasihat Al-mulk yang membagi wilayah kepemimpinan menjadi dua kategori. Pertama, pemimpin dari golongan umara‘ (pemerintah) yang diwakilkan oleh para wazir dan imam. Kedua, dari ulama (yang diwakilkan dari golongan kaum fuqaha‘ atau cendekiawan dan hukama‘ (para ahli hikmah).

Sedangkan Gus Dur pada saat menjabat sebagai ketua umum PKB selalu menggaungkan akan pentingnya persaudaraan kebangsaan tanpa adanya sekat-sekat antara anak bangsa. Bagi PKB negara ini harus berdiri tegak menolak segala bentuk deskriminasi dan kesenjangan sosial. Hal itu dibuktikan ketika Abdurrahman Wahid sebagai tokoh utama

PKB mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 lantaran bertentangan dengan UUD 1945.

Inpres tersebut selama bertahun-tahun menyandera etnis Tionghoa karena tak dapat merayakan hari-hari besar seperti Imlek dan Cap Go Meh atau beribadah secara terbuka. Setelah mencabutnya, Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6 tahun 2000 yang menjamin warga Tionghoa dapat menjalankan kegiatan keagamaan,kepercayaan, dan adat istiadatnya secara terbuka.

Dari dua contoh Kiai ini maka tentunya ada role model serta gambaran awal bagaimana peran serta ulama dalam memilih jalan politik serta apa saja keputusan penting utama dalam menjaga kestabilan antara agama dan bangsa.

Telah banyak kajian yang menegaskan Kiai sebagai pemimpin kharismatik dengan otoritas yang melampaui perannya sebagai pemimpin agama, seperti yang dilakukan di awal- awal pengkajian tentang Kiai oleh Geertz (1960), Binder (1960), Jay (1969), Noer (1973) Wahid (1974),Horikoshi(1987) danDhofier(1980). Dengan otoritas yang dimilikinya, hingga kini Kiai dapat menjalankan kepemimpinan yang diikuti dengan ketaatan yang total oleh para pengikutnya . Kedudukan Kiai yang istimewa tidak lepas dari pengaruh perjalanan kehidupannya yang menjadikan dia sebagai elit terdidik, ia memiliki keahlian untuk melakukan transformasi pengetahuan Islam kepada para pengikutnya. Kiai menjadi guru tunggal terutama jika berada di Pesantren .

Kekayaan yang dimiliki oleh Kiai juga

menempatkannya sebagai “perebahan” bagi Masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi Dengan tampilnya Kiai sebagai patron ditengah-tengah masyarakat menjadikan pengaruh Kiai di masyarakat Islam Indonesia mengakar kuat. Kiai adalah bagian kalangan elit dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat setempat. Sehinggaketergantungan masyarakat kepada Kiai sangat tinggi (Pribadi, 2013). Mereka merupakan pembuat keputusan yang efektif dalam persoalan sosial politik di Indonesia. Sebagai penganjurIslam, menjadikan pengaruhnya melampaui batas-batas teritorial tempat tinggalnya dan pesantrennya (Pribadi, 2018).

Apalagi jika ditambahkan dengan pengaruh hubungan psikologis guru-murid yang sangat menyentuh dan kuat sehingga pandangan dan petunjuk Kiai memiliki dampak yang sangat luas jika diperhitungkan dengan jumlah alumni pesantren yang telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia (Asror, 2010). Eksistensi Kiai dengan seperti itu, senyatanya telah jauh menjadi pemimpin non-formal bagi masyarakat. Dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, peran dan fungsi Kiai hadir melengkapi kekurangandankelebihanyangterdapat padajajaran pemerintah mulai dari tingkat desa maupun pusat. Karena itu bukan hal yang mengherankan lagi jika banyak dari pejabat pemerintah yang datang kepada Kiai untuk berkonsultasi maupun memanfaatkannya ketika pemilu.

Demikian juga sebaliknya, ketika Kiai dan pesantren maupun jamiyah yang dipimpinnya mengalami kesulitan dalam operasionalnya maka Kiai akan meminta kepada para

pejabat untuk menyelesaikannya. Hubungan ini menampilkan sisi hadirnya kekuasaandalam dunia Kiai yang cenderung saling memanfaatkan. Hubungan Kiai dengan kekuasaan yang terus melanggeng hingga kini perlu menjadi kajian yang serius dalam rangka untuk melihat nilai-nilai yang dibangun di dalam hubungan tersebut, baik kaitannya dengan pejabat pemerintah maupun dengan umat Islam di Indonesia. Melalui pendekatan sejarah sosial dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut hidup di tengah-tengah umat Islam Indonesia sejak masa pra kemerdekaan hingga sekarang.

Pengetahuan Kiai terhadap kekuasaan dan politik sesungguhnya bukanlah hal yang benar-benar baru apalagi dipertentangkan. Karena kitab-kitab klasik yang diajarkan turun- temurun menjadi genealogi keilmuan dan tradisi pesantren, yang dikarang oleh ulama abad pertengahan bukanlah kitab-kitab yang hanya berisi tentang persoalan peribadatan ritual saja. Melampaui hal itu menyentuh pada arasy bidang-bidang yang komprehensif yang diperlukan dalam kehidupan manusia, pun juga persoalan politik (Hadiz & Teik, 2011). Memperkuat pendapat tersebut, jika dirunut pada masa awal mula disyiarkannnya agama Islam, persoalan kekuasaan justru menunjukkan pada pemikiran dan gejala yang signifikan, yang amat detail dan universal sifatnya, seperti tergambar dalam “Piagam Madinah”.

Melalui piagam ini, kita bukan hanya ditunjukkan kepada peristiwa yang sistematis dalam melakukan penataan model pemerintahan yang tersusun secara rapi dalam kerangka

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan kemajuan bangsa, bahkan lebih dari itu sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah Saw., dalam pemerintahan Madinah adalah sesuatu yang pada masa dan tempatnya yang modern (Islam et al., 2020). Studi Barton (2014), menyebutkan hampir semua kitab klasik yang menjadi sumber rujukan para Kiai dalam menjalankan praktik keberagamaan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin politik.

Keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun Madinah menjadi seruan implisit bagi umat Islam untuk memadukan antara agama dan politik. Kenyataan ini tidak hanya diterima sebagai realitas, bahkan dijadikan sebagai konsep ajaran (fiqh) (Maimuoen, 2014). Melihat sumber doktrin yang dijadikan rujukan para Kiai untuk kekuasaan, maka bisa dipastikan politik Islam tentunya menggunakan politik-agama. politik Islam tujuannya adalah memberi manfaat di dunia dan di akhirat, karena itu ketetapan yang digunakan tidak hanya merujuk pada apa yang diciptakan oleh negarawan, filosof maupun politikus tapi lebih penting dari itu juga menggunakan ketetapan yang digariskan secara umum oleh Allah. Untuk itu perlu merujuk pada aturan-aturan Islam, pun dalam urusan kenegaraan (Stanizai, 2020). Namun hal itu saja belum tuntas untuk menjadi perwujudan sistem pengaturan masyarakat yang memiliki kebutuhan berbeda-beda dan tentunya tidak bisa menghidupi dengan sendirinya. Jika tidak diatur, maka akan terjadi perselisihan yang bisa menyebabkan

perpecahan dan hilangnya kedamaian.

Akibatnya tidak tenang dan nyaman dalam menjalankan ibadah (Zain & Ridwan, 2020). Oleh karena itu dibutuhkanlah “ilmu politik” berbeda dengan “fiqh politik” Jika ranahnya halal- haram “ilmu” menjangkau kepada “bagaimana mengatur dan mengurusi public”. Sedangkan dalam Al-Quran dan Hadits tidak pernah tersebut bagaimana model pemerintahan apakah negara bangsa, kerajaan, federal, republik dan parlementer. Nash-nash yang ada hanya mewajibkan kepada umat Islam untuk membentuk pemerintahan tanpa memberi batasan pada modelnya, dan juga kewajiban mereka untuk mentaati penguasa (Maimuoen, 2014). Oleh karena itu, konsep dalam mengelolah negara dan pemerintahan dalam ajaran Islam tidaklah statis, lebih dari itu selalu dapat dinegosiasikan dengan kebutuhan politik (Jawad, 2013).Berdasarkan sumber rujukan utama dalam Islam dan kajian dari ulama terdahulu, dapat dilihat bahwa pertimbangan politik Islam Kiai ini dalam politik kenegaraan akan merujuk pada nilai-nilai keagamaan yang dianutnya.

Pertama, Orientasi para Kiai dalam terjun ke dunia politik adalah untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Konsep amar ma’ruf nahi munkar ini diletakan dalam pengertian yang luas, yaitu pengawasan dan evaluasi. Dalam pandangan Kiai, konsep ini memiliki peran signifikan, karena dalam kenyataannya tatanan sosial-politik yang ada banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Karena itulah para Kiai merasa perlu untuk terjun ke dalam dunia politik untuk

mewujudkan kontrol kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan moral, hukum, maupun aturan agama.

Selain itu, konsep amar ma'ruf ini hendaknya juga dipahami dalam cakupan dan pengertian yang luas, yaitu mewujudkan perbaikan sistem pendidikan, penegakan supremasi hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memprioritaskan pembangunan bagi rakyat. Meskipun demikian, masuknya para Kiai ke dunia politik tidak selalu membawa implikasi yang menggembirakan. Misalnya pesantren yang tak terurus dengan baik, ataupun fungsi-fungsi sosial-keagamaan Kiai yang sedikit banyak terdegradasi.

Kedua, Kiai bisa mengayomi dan memberi sentuhan spiritual dan etika moral terhadap pengurus dan kader. Adapun peran politik Ustadz Nurul Ain Akyas dalam proses politik di parpol Partai Keadilan Sejahtera saat ini, dari hasil penelitian dilapangan bahwa pada prinsipnya hanya satu hal yaitu, dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar dengan memberikan pesan moral, nasihat (tausiyah) kepada para pengurus harian partai Partai Keadilan Sejahtera dan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ada empat sifat yang harus selalu tertanam dalam hati Kader Partai;

1. Sifat siddiq (Jujur); Jangan pernah membohongi masyarakat apalagi menganggap enteng hukum Allah;
2. Amanah (dapat dipercaya); sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera hendaknya bisa dipercaya, dan memberi contoh yang baik; jelasnya.

3. Tabligh (Menyampaikan); Salah satu tugas anggota dewan adalah menyampaikan amanah rakyat; jangan hanya duduk, diam; Katakan yang benar itu benar dan yang salah tetap salah walaupun itu pahit adanya.
4. Fatonah (Cerdas); Sebagai anggota dewan harus cerdas membaca situasi lingkungan sekitar, cerdas mensikapi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat dan peduli terhadap kepetingan sesama tutur Kiai Haris.
5. Kader Partai adalah satu kesatuan yang utuh, maka kebersamaan, kekompakan dan komitmen harus tetap dijaga, ketika sudah tidak ada lagi kebersamaan dan komitmen maka tunggulah kutukan dari Allah Swt., tegasnya.

Peneliti mengkategorikan peran politik dia dalam tiga hal yang cukup penting untuk dianalisis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peran dalam Pengambilan Kebijakan Partai Dalam hal pengambilan kebijakan partai, Partai Keadilan Sejahtera selalu menggunakan sumber ajaran Islam sebagai dasar utama pengambilan keputusan partai. Biasanya sebelum Ustadz Nurul Ain Akyas mengambil keputusan partai bersama anggota yang lain, draff yang terkait kebijakan dan peraturan perundang- undangan itu disampaikan terlebih dahulu untuk dipelajari. dalam wawancaranya yang ditemui penulis dikediamannya tentang pengambilan kebijakan partai, di Partai Keadilan Sejahtera ,Kiai selalu diberi draff sebelum kebijakan itu diputuskan oleh partai. Hal yang

krusial Kiai memberikan fatwa dan saran. Misalnya, ada draff tentang UU perkawinan, dimana ada pasangan pria-wanita yang belum diikat dengan akad nikah secara sah menurut agama, hubungan kedua orang itu dianggap zina kalau antara kedua pelaku (pria dan wanita) itu tidak saling setuju atas pebuatannya. Akan tetapi kalau keduanya setuju atas perbuatannya, hal itu tidak dianggap zina. Hal ini bagi Partai Keadilan Sejahtera jelas-jelas menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Salah satu tugas Ustadz Nurul Ain Akyas di struktural parpol Partai Keadilan Sejahtera yaitu memberi fatwa dan masukan yang sesuai dengan ajaran. Islam. Dalam memberi fatwa tersebut, bisa dengan rapat insidental dikantor fraksi atau dengan cara informal.

Peran dalam Sosialisasi Politik Metode sosialisasi politik salah satunya yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses yang dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, symbol, norma termasuk melalui kegiatan kursus, diskusi, pengajian, halaqoh dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, di parpol Partai Keadilan Sejathera khususnya yang dilakukan oleh Ustadz Nurul Ain Akyas adalah sebagai berikut, dari petikan wawancaranya, “Proses politik - misi Kiai berpolitik adalah dengan politik kerakyatan bukan parsial. Saat ngaji ya ngaji. Tetapi ketika ada diskusi, pertemuan, khusus kelompok Partai Keadilan Sejahtera ada pengajian, konfrensi cabang yang diadakan tiap 5 tahun sekali. Disamping memberi ceramah agama

(pengajian), disitulah kami juga bersosialisasi dengan menyampaikan prinsip perjuangan dan program-program kepartaian". Halaqoh ulama Partai Keadilan Sejahtera merekomendasikan perlunya peningkatan kedewasaan umat Islam dalam berpolitik, sehingga bisa mencerminkan perilaku politik yang terpuji di mata masyarakat dan Tuhan. Menurutnya "Para ulama harus mampu memberikan bimbingan kepada para politikus Islam agar berpolitik dengan memegang teguh prinsip- prinsip amanah dan berakhlakul karimah," Dia mengingatkan, partai Islam, lebih-lebih Partai Keadilan Sejahtera agar berpolitik dengan memegang prinsip yang terpuji sehingga kepercayaan rakyat dan konstituen tidak luntur. Menyikapi sorotan publik yang minus pada politikus, Kiai Shodaqoh menyarankan perlu pendekatan kasih sayang untuk selanjutnya diwujudkan dalam kehidupan politik secara nyata. Keteladanan individu dalam sosialisasi politik ini ternyata masih efektif yang terjadi pada figur Ustadz Nurul Ain Akyas dalam kesehariannya. Walaupun responnnya tidak terlalu signifikan dalam pilihan politik santri atau masyarakat. Berkaitan antara keteladanan pribadi beliau ada beberapa catatan penting tentang respon ini, yaitu Para pemilih membuat keputusan diakhir sosialisasi atau mengubah pendapat mereka selama sosialisasi mempunyai kemungkinan lebih besar dipengaruhi oleh keteladan pribadi Kiai.

Peran dalam Rekruitmen Politik Rekruitmen politik merupakan suatu proses politik yang biasanya mengantarkan seseorang untuk menuju jabatan-jabatan dalam pemerintahan.

Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa proses rekruitmen politik ini sifatnya terbatas. Karena itu, rekruitmen politik sering sering dikenal sebagai proses elitis daripada proses populis. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dalam hal proses politik, termasuk peran dan keterlibatan Kiai pada pilpres, pemilukada dan pileg dalam konteks rekruitmen politik di sebuah partai politik khususnya Partai Keadilan Sejahtera pendapatnya tentang calon-calon yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam pilpres, pemilukada dan pileg. Ustadz Nurul Ain Akyas selalu menekankan calon-calon yang santun, berakhlak mulia dan selalu mengedepankan nilai-nilai Islam. Walaupun keputusan terakhir ditangan pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya. Bagi partai Partai Keadilan Sejahtera ,kaderisasi adalah salah satu aktivitas utama yang menandakan keberlanjutan kehidupan partai. Kaderisasi merupakan salah satu media rekruitmen, pemantapan komitmen dan ideologi politik, pengembangan kapasitas personal dan penguatan kelembagaan partai yang berorientasi jangka panjang. Tanpa kederisasi, partai bagaikan organisme yang sulit untuk bernafas apalagi untuk berproduksi. Ini jelas bahwa peran Ustadz Nurul Ain Akyas dalam proses politik di Partai Keadilan Sejahtera khusus pada rekruitmen politiknya masih cukup kental. Cuma masalahnya adalah dilakukan atau tidak, ini tergantung mereka.

Bagian 4

Sang Kiai dalam Parlemen

A. Kenapa Kiai harus Berjuang di Parlemen

Islam sangat mementingkan politik. Setidaknya ada dua alasan yaitu *hirashah al diin* (menjaga agama), dan *siyasah al dunya* (mengatur bumi). Dalam sejarah tercatat bahwa Rasulullah, selain sebagai pemimpin Agama, negara, juga sebagai ahli dalam berpolitik. Piagam Madinah adalah contoh politik Rasulullah yang amat hebat. Rasulullah yang berfungsi sebagai Nabi dan tokoh politik, sukses besar dalam menjalankan pemerintahan Islam. Dua suku, Aus dan Khazraj yang sudah berabad-abad bermusuhan berhasil dipersaudarakan, Kristen, Yahudi, Nasrani, dan bahkan kaum Pagan bisa hidup berdampingan damai dan tentram di kolong bumi Madinah. Hal ini bisa terjadi karena kepiawaian seorang politikus Islam yang berintegritas tinggi; santun, jujur, amanah, dan disiplin. Demikian halnya kepemimpinan sahabat dengan model khilafah.

Menurutnya, orang Islam seharusnya tidak boleh memisahkan dua kepentingan besar dalam Islam yaitu kepentingan menjaga agama dan kepentingan mengatur bumi. Sebagaimana tidak boleh memisahkan ulama dengan perannya sebagai pewaris nabi yang wajib mengurus bumi Allah. Masyarakat *sebaiknya* pandai dan mengetahui sejarah, bahwa Ulama adalah Pewaris

Nabi. Mereka mempunyai tugas yang mulia, yaitu menjaga agama dan memperjuangkan kebutuhan dan keadilan masyarakat, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para khalifah dan ulama salaf. Jika paradigma masyarakat seperti diatas tetap dipelihara, maka bukan tidak mungkin agama Islam akan rusak, mundur dan stagnan karena urusan itu direkomendasikan kepada para politikus murni yang kurang paham akan nilai-nilai ajaran Islam. Masyarakat akan semakin tidak berdaya. Integritas yang mereka miliki tidak teruji karena kedangkalan pengetahuan agama mereka.

Menurutnya, Sebaiknya masyarakat yakin bahwa dengan memberikan mandat kepada ulama dalam memainkan *politiknya*, negara akan aman, masyarakat akan makmur, damai dan sejahtera. Sebaliknya jika mandat itu dibebankan kepada orang yang tidak paham agama, maka praktek kolusi, nepotisme, dan korupsi semakin menjamur. Semakin banyak tokoh agama yang mengambil peran dalam menjalankan politik, baik di legislatif, yudikatif, dan eksekutif, maka akan membawa dampak yang lebih positif.

Jika penulis dapat menyimpulkan dari narasi tersebut bahwa beliau termotivasi untuk ikut serta berperan sebagai praktisi dalam dunia politik adalah:

1. Mengembalikan citra politik yang sudah menjadi bagian dari Islam itu sendiri
2. Memberikan pesan secara tidak langsung bahwa politik adalah salah satu jalan terbaik untuk mengatur agama dan dunia kea rah yang lebih baik;
3. Menjadi salah satu wasilah yang mengikuti sunnah nabi dan

para sahabat yang terjun dalam politik dan memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk memajukan kesejahteraan masyrakat lewat politik.

Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara- negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Istilah bahasa Inggris berasal dari Anglo-Norman dan berasal dari abad ke-14, berasal dari Parlemen Prancis abad ke-11, dari "parler", yang berarti "untuk berbicara". Makna ini berkembang dari waktu ke waktu, awalnya mengacu pada setiap diskusi, percakapan, atau negosiasi melalui berbagai jenis kelompok deliberatif atau yudisial, sering kali dipanggil oleh seorang raja. Pada abad ke-15, di Inggris, itu secara khusus berarti badan legislatif.

Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlementer di mana eksekutif secara konstitusional bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem presidensial di mana legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintahan dan sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen. Beberapa negara mengembangkan sistem semipresidensial yang menggabungkan seorang Presiden yang kuat dan seorang eksekutif yang bertanggungjawab kepada parlemen.

Parlemen dapat terdiri atas beberapa kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk unikameral atau bikameral meskipun terdapat beberapa model yang lebih rumit. Seorang Perdana Menteri (PM) adalah hampir selalu seorang pemimpin partai yang memiliki posisi mayoritas di majelis rendah pada parlemen, tetapi

hanya menduduki jabatan tersebut selama parlemen masih mempercayainya. Jika anggota majelis rendah kehilangan kepercayaan dengan alasan apapun, maka mereka dapat mengajukan mosi tidak percaya dan memaksa PM untuk mengundurkan diri. Hal ini dapat sangat berbahaya bagi kestabilan pemerintahan jika jumlah posisi suara relatif seimbang. Fungsi Parlemen di Indonesia Dikutip dari indonesia.go.id, yang termasuk lembaga parlemen di Indonesia adalah MPR, DPR, dan DPD. Berikut merupakan fungsi lembaga parlemen di Indonesia.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

   MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) undang-undang dasar (UUD) 1945, ketentuan tugas dan wewenang MPR antara lain:

   a. Mengubah serta menetapkan UUD. Melantik presiden serta wakil presiden. berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR.
   b. Memutuskan usul DPR atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
   c. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
   d. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan

presiden, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya (selambat-lambatnya di dalam waktu enam puluh hari lama nya).

e. Memilih presiden dan wakil presiden, jika keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya (dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan partai politik).
f. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR. Masa bakti para anggota MPR-RI 2019 hingga 2024 berjumlah 711 orang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Di Indonesia, parlemen itu sama dengan DPR. DPR merupakan lembaga tinggi negara sebagai perwakilan rakyat, yang di dalamnya terdiri dari anggota partai politik. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Dilansir dari laman resmi DPR RI, DPR memiliki 3 fungsi yang terdiri dari legislasi, anggaran, dan pengawasan. Semua fungsi DPR tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, sekaligus sebagai pendukung pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri berdasarkan ketentuan perundangan-undangan. Masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 berjumlah 575 orang.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga legislatif yang berperan untuk memberikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI, DPD memiliki fungsi legislasi,

pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 berjumlah 136 orang. Relasi Kiai dengan dinamika politik lokal merupakan kajian menarik dalam lanskap penelitian politik Islam di Indonesia. Seorang Kiai sendiri tidaklah dimaknai sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan saja, akan tetapi bagaimana menelaah Kiai sebagai pembentuk ruang kuasa sosial poltik dalam kemasyarakatan. Hal inilah yang kemudian membedakan Kiai dengan sebutan ulama dimana ulama berfokus pada pengembangan syiar dan dakwah keagamaan. Dalam relasi sosio-kultural umat Islam di Indonesia, Kiai memiliki kedudukan dan posisi penting dalam membina dan menata kehidupan sesuai kapasitasnya sebagai para pewaris para nabi (waratsat al anbiya).

Adapun makna para pewaris nabi tersebut memberikan legitimasi bagi Kiai untuk menjalankan berbagai tugas diantaranya mendidik umat di bidang agama dan lainya, melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat, memecahkan problem sosial yang terjadi di masyarakat, dan menjadi makelar budaya (cultural brokers) yakni menjadi agen perubahan sosial dalam masyarakat. Melalui berbagai peran yang diembannya baik dalam bidang keagamaan dan bidang sosio-kultural, Kiai kemudian tampil sebagai patron yang memiliki kekuasaan hierarkis atas masyarakat.

Ditinjau dari segi ilmu politik, Kiai merupakan aktor politik yang mempunyai sumber daya politik berbasis

kharismatik dan tradisional yang memungkinkan Kiai membentuk sikap atau preferensi politis tertentu dalam struktur sosial masyarakat di sekitarnya (Mulkhan, 2009: 55). Hal tersebut bisa tercermin dari kasus pemilihan kepala daerah di berbagai daerah dimana kandidat kepala daerah beserta wakilnya sowan ke pondok pesantren untuk meminta restu politik sang Kiai untuk maju dalam pemilukada di daerahnya. Selain itu, Kiai juga sering dimintai pendapatnya oleh kepala daerah dalam mengambil berbagai keputusan-keputusan penting dalam pemerintahannya. Restu maupun pendapat Kiai secara politis dimaknai sebagai rujukan sahih bagi kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya. Masuknya Kiai dalam ranah politik sebenarnya dapat diterjemahkan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dimana terjadi reposisi Kiai menjadi ulama. Pemaknaan antara Kiai dan ulama perlu diperjelas dimana ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif birokrat dan politis, sedangkan Kiai cenderung bermain pada tataran kultural (Faridl, 2007: 238).

Implikasi transisi Kiai menjadi ulama sendiri turut berimbas pada pemaknaan pesantren yang tidak lagi sebagai sekolah keagamaan bagi santri, akan tetapi juga pesantren disimbolkan sebagai episentrum kekuataan politik lokal yang diantaranya membentuk faksi-faksi Kiai politik seperti Kiai sepuh, Kiai khos, Kiai poros langitan, Kiai poros lirboyo, maupun Kiai poros tebu ireng. Maka kajian ini hendak meneliti mengenai relasi kausalitas Kiai dan pesantren dengan

dinamika politik lokal khususnya yang terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah yang memiliki basis Nahdliyin terbesar di Indonesia.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah memetakan basis sosial politik Kiai dan pesantren dalam konteks politik lokal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan mengetahui pengaruh ulama dalam membentuk preferensi politik di masyarakat. Kajian ini akan diawali dengan bahasan tentang relasi ulama dan politik, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan basis sosial politik ulama dan pesantren, dan yang terakhir mengangkat faksionalisasi Kiai dan pesantren dalam dinamika lokal.

Aktivitas para Kiai berlanjut ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno 17 Agustus 1945 namun bukan berarti campur tangan pihak asing berhenti dari campur tangan untuk menguasai Indonesia. Hal itu disikapi oleh para Kiai yang di pimpin oleh Kiai Hasyim.

Asyari dengan mengeluarkan fatwa pada 22 Oktober 1945 yang isinya menegaskan bahwa jihad (perang) melawan penjajah hukumnya adalah fardhu ain (kewajiban yang dikenakan kepada setiap individu) (Suryanegara, 1995). Tekadinisemakindipertegas olehpara kya idalam Muktamar ke- 16 di Purwokerto tahun 1946, dimana dalam muktamar tersebut status wilayah Indonesia dinaikkan menjadi darul harbi (wilayah perang) yang berkonsekuensi seruan jihad(perang)bagiseluruh umatIslam (Bustami, 2015).

Pada awal kemerdekaan, posisi politik Islam belum

menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam konstelasi perpolitikan di Indonesia karena hanya 15 dari 136 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan wakil Islam. Karena itu para pemimpin Islam menyerukan masyarakat untuk mendirikan partai politik dengan mengadakan Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, 7-8 November 1945. Kongres Ini berhasil membentuk Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) sebagai wadah politik satu-satunya bagi umat Islam (Esposito, 1984). Gabungan organisasi Islam yang tergabung dalam Masyumi itu hanya bertahan enam tahun.

Perbedaan pandangan karena Masyumi lebih banyak dikuasai golongan modernis danketerwakilandi parlemenserta percekcokan kepantasan bagi pemegang kementerian agama saat itu membuat para Kiai yang tergabung dalam organisasi NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Penarikan diri ini menampakkan bagaimana para Kiai NU melakukan apa yang meyakinkan para Kiai bahwa ini menawarkan cara yang paling efektif dalam memperjuangkan kepentingan keagamaan dan sosial NU. Kekuasaan, kewibawaan dan sumberdaya dapat diperoleh melalui jalan politik maupun lembaga keagamaan tradisional. Para Kiai kemudian mendeklarasikan NU sebagai partai politik. Tampilnya NU sebagai partai politik yang ikut dalam kontestasi pemilu tahun 1955 tidak bisa diremehkan. Bukti atas besarnya dukungan terhadap para Kiai NU menempatkan NU sebagai partai politik pemenang pemilu urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi (Fealy, 2003).

Sebelum pemilu, Masyumi telah tiga kali menjadi partai yang berkuasa yaitu masa perdana menteri Muhammad Natsir (1950-1951), Perdana Menteri Sukiman (1951-1952) dan Perdana Menteri Burhanudin Harahap (1955-1956). Namun pada pemilu tahun 1955, PNI adalah pemenangnya dengan demikian menggantikan Masyumi sebagai partai yang berkuasa (Esposito, 1984). Di tahun-tahun berikutnya keterwakilan perjuangan para Kiai di pemerintahan mendapatkan porsi yang lebih besar sebagai menteri sejak kabinet Sastroamidjojo kedua (1956-1957) hingga pada akhirnya digantikan oleh orde baru (Fealy, 2003). Di tahun 1956 ketika Majelis Konstituante mengadakan sidang salah satunya terkait perumusan dasar falsafah negara menggunakan pancasila dan Islam, seluruh partai yang berasas Islam mendukung Islam dijadikan sebagai dasar ideologi negara.

Tetapi suara mereka hanya 48 persen, sedangkan 52 persen lainnya mendukung pancasila sebagai dasar ideologi negara. Masing-masing kelompok tidak dapat mencapai 2/3 suara dalam keputusan tersebut yang merupakan syarat pengesahan konstitusi (Noer, 1987; Nasution, 1995). Persaingan antar partai politik dalam demokrasi parlementer kemudian berakhir ketika dikeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang membawa Indonesia pada demokrasi terpimpin. Perubahan ini menjadikan parpol merubah strategi dalam perjuangannya, begitupun NU dan Masyumi. Arah pergerakan Masyumi yang menjadi wadah bagi kelompok Muslim modernis lebih mengedepankan sikap konfrontatif

terhadap pemerintah, sebaliknya para Kiai tradisional memilih jalan kooperatif. Saat itu para Kiai khususnya yang tergabung di NU di klaim sebagai golongan pragmatis yang oportunis. Namun hal itu dibantah sebagai bagian dari prinsip NU yang selalu dipegang teguh dalam menerapkan tentang ide maslahah mursalah.

Sehingga sikap kooperatif itu ditunjukkan oleh para Kiai NU melalui Konferensi Alim Ulama yang diadakan di Cipanas dipimpin oleh Menteri Agama, Kiai Masykur dan dihadiri para Kiai NU dan Perti memutuskan bahwa Soekarno dan para pejabat negara yang berkuasa sebagai waliyul amri addhoru bisyaukah, sebagai penguasa yang sah secara umum karena kekuasaannya yang harus ditaati oleh umat Islam (Andree Feillard, 1999) Pemberian gelar itu dimaksudkan sebagai langkah dalam memberikan jalan kepada pengadilan syariah, seperti kasus di Sumatera sebagai pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya daripada pengadilan adat (Lev, 1972). Pemberian gelar tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Muktamar Nu ke-20 di Surabaya tahun 1954. Keputusan ini kenyataannya memang juga dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno untuk mendelegitimasi gerakan Darul Islam (DI) yang masih kuat. Sehingga langkah ini sering difahami dan disalahartikan sebagai bentuk main mata Kiai NU dengan penguasa untuk keperluan pragmatis (Bruinessen, 1994). Sejumlah tokoh menilai langkah tersebut sebagai kemunduran politik NU.

Dengan menyetujui kebijakan politik Soekarno

menandakan sebagai watak dasar dari perilaku politik Kiai NU. Secara politik Nu kekuatan oposisi yang berdampak bagi negara (Rais, 1984). Perwujudan langkah mengakui penguasa yang sah ditunjukkan sebagai paradigma politik Islam Sunni yang lebih mengakui pemimpin zalim daripada kekacauan politik akibat tiadanya seorang pemimpin (Andree Feillard, 1997). Pandangan ini tercermin dalam politik Islam Kiai yang lebih mengedepankan akomodatif untuk mencapai kemaslahatan umat dari pada mengedepankan sifat konfrontatif yang dapat mengorbankan kemaslahatan umat. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa paradigma tersebut diberlakukan selagi tidak bertentangan dengan nilai yang telah dikembangkan dalam tradisi fiqih pesantren. Karena kita juga bisa melihat betapa kerasnya fatwa para Kiai terhadap penjajah bahkan dengan mengeluark dianggap dapat mengancam kemaslahatan pelaksanaan keberagamaan umat Islam dan kehidupan umat Islam itu sendiri dan Bangsa Indonesia secara umum.

Lain halnya dengan Masyumi yang cenderung mengambil sikap konfrontatif terhadap penguasa, yang kemudian dituduh makar karena keterlibatan sejumlah tokoh dan anggota partai dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Masyumi akhirnya dipaksa bubar oleh Soekarno tahun 1960 (Maarif, 1987). Bubarnya Masyumi menjadikan NU satusatunya representasi politik umat Islam di tengah persaingan politik yang didominasi oleh kubu Soekarno-PKI-Angkatan Darat (AD).

Inilah momentum NU secara langsung sebagai kekuatan Islam terbesar dalam melawan komunisme. Organisasi yang digerakkan para Kiai ini kemudian mendirikan anak organisasi hampir di seluruh bidang profesi (Yusuf, 1983), menandingi gerak PKI dalam membangun sayap organisasinya, sebagai bagian dari penataan basis politik Islam. Dominasi politik Islam Kiai ini nampak dalam susunan DPR-GR dimana NU mendapat 36 kursi dan sekaligus memegang posisi menteri yang strategis dalam pemerintahan dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Reformasi politik tahun 1998 membuka kran partisipasi politik Kiai dalam proses politik praktis. Dukungan terhadap pembentukan partai dari para Kiai yang dapat mewakili keterlibatan mereka menjadi contoh yang paling tepat terhadap intensitas keterlibatan Kiai dalam politik. Dari situ lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didukung sepenuhnya oleh NU dengan melibatkan Kiai-Kiai NU ditingkat pusat yang dikenal dengan tim lima, diantaranya : Kiai Ma'ruf Amin(Rois Syuriah PBNU), Kiai Dawam Anwar (Katib Amm PBNU), H. Rozi Munir (Ketua PBNU), Kiai Said Aqil (Wakil Katib), dan H. Ahmad Bagja (Sekjen PBNU). Selain juga ada tim asistensi yang semuanya terdiri dari pengurus organisasi sayap NU. Lahirnya PKB secara otomatis menarik kebanyakan Kiai-Kiai; baik yang sebelumnya aktif dalam kepengurusan NU maupun mereka yang hanya menjadi pimpinan pesantren, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (Choiri, 2002; Asyari, 2009).

Pemilihan umum tahun 1999 membuktikan bahwa peran Kiai baik yang mencalonkan sebagai legislatif maupun yang mendukung cukup signifikan dalam mendulang perolehan suara PKB, sehingga PKB menempati urutan ke empat setelah PDI, Partai Golkar dan PPP. Keputusan para Kiai untuk melanggengkan Gus Dur sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Habibie adalah keputusan politik yang melibatkan seluruh sumberdaya Kiai yang duduk di DPR. Sekalipun dukungan itu lewat jalur porostengah yang digalang oleh Amin Rais melalui koalisi partai-partai berbasis pemilih Muslim. Melalui pemilihan yang melibatkan anggota MPR, Gus Dur mendapatkan perolehan suara terbanyak mengungguli Megawati (Sobari, 2000). Sampai kepada pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan pada 21 Juli 2001 melalui hak angket Buloggate dan Bruneigate, para Kiai yang berada di PKB maupun mereka yang diluar gelanggang politik praktis berupaya untuk menghentikan Sidang Istimewa dengan memobilisasi massa ke Jakarta; berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR. Saat itu jugamuncul PasukanBerani Mati yang siap menyerahkan jiwanya untuk mempertahankan Gus Dur di kursi kepresidenan (Feillard, 2002). Ketika pilpres 2004, kekuatan dukungan para Kiai terbelah menjadi dua dikarenakan saat itu calon yang menggambarkan secara kuat wakil dari NU ada dua yang sama-sama menjadi cawapres, yakni Kiai Hasyim Muzadi dan Kiai Salahudin Wahid.

Posisi Kiai Hasyim yang saat itu juga sebagai Ketua Umum PBNU mendapat kritikan keras dari kubu Gus Dur dan

poros Langitan, yang dikenal sebagai para Kiai khos ketika Gus Dur memproklamirkan mereka pada saat Sidang Istimewa (SI) pemilihan Presiden masa transisi di tahun 1999. Para Kiai tersebut diantaranya: Kiai Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), Kiai Abdullah Abbas (Buntet, Cirebon), Kiai Abdurrahman Khudlori (Tegalrejo, Magelang) beserta Kiai Jawa Timur lainnya, yakni Kiai Mas Subadar (Pasuruan) Kiai Sholeh Qosim, Kiai Khotib Umar (Jember), Kiai Idris Hamid (Pasuruan), Kiai Anwar Iskandar(Kediri), Kiai HamidAbdul Manan (Pamekasan), Kiai Nurul Huda dan Kiai Munif Jazuli (Ploso), Kiai Nawawi Abdul Jalil (Sidogiri), Kiai Ja'far Yusuf (Sampang), Kiai Abdullah Ubaid (Langitan), dan Kiai Lutfi abdul Hadi (Malang). Bukan hanya persoalan tentang Kedudukan Kiai Hasyim tapi juga menyangkut fatwa haram bagi wanita untuk menjadi presiden (Noeh, 2014).

Di kubu lain yang mendukung terhadap pencalonan Kiai Hasyim adalah munculnya poros Lirboyo diantaranya: Kiai Idris Marzuqi dan Kiai Abdullah Kafabih (Lirboyo), Kiai Masduqi Mahfudz (Malang), Kiai Ali Masyhuri (Sidoarjo), Kiai Zainuddin Jazuli (Ploso), Kiai Abd. Ghofur (Lamongan), Kiai Hasyim Syafaat (Banyuwangi), Kiai Bashori Alwi (Malang), Kiai Mansur Sholeh (Jember), Kiai Zubair(Bangkalan), Kiai Muaffa Asyari (Pamekasan), Kiai Subadar (Pasuruan), Kiai Miftahul Ahyar (Surabaya) dan lain - lain yang tercantum dalam Dokumen Piagam Madinah dukungan para Kiai terhadap pencalonan Megawati-Hasyim Muzadi (Noeh, 2014:106-18). Pada putaran kedua pilpres

2004, poros Langitan menyatakan netral dalam dukungan, karena calon mereka tidak lolos. Para Kiai menyerahkan kepada masyarakat untuk mendukung antara pasangan MegaHasyim atau SBY-Kalla (Noeh, 2014) .

Perkembangan politik berikutnya terjadi perpecahan ditubuh PKB yang pada akhirnya melahirkan partai baru dari kalangan Kiai NU, yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada tahun 2006. Awalnya dari peristiwa Muktamar ke2 PKB tahun 2005 yang dianggap cacat hukum. Kemunculan pernyataan cacat hukum itu dilontarkan oleh sejumlah Kiaidari poros Langitan dan yang sebelumnya ada di poros Lirboyo termasuk juga Gus Solah dan Kiai Yusuf Hasyim, Tebuireng. Pada muktamar tersebut dilakukan pemilihan secara aklamasi yang memutuskan hasil Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro serta Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB (Bustami, 2009). Sehingga puncaknya pada tanggal 31 Maret 2007, sebanyak 17 Kiai dari poros Langitan mendeklarasikan berdirinya PKNU di hadapan para Kiai dan masyarakat yang bertempat di Pesantren Langitan (Tim ELVEKA Institute, 2008). PKNU tampil sebagai peserta pemilu tahun 2009 meskipun tidak lolos ambang batas suara di pemilihan legislatif tingkat pusat. Sehingga, pada pemilu di tahun 2014 PKNU tidak lagi muncul. Pemilihan kepala daerah langsung pada tahun 2015 turut memperkuat penampilan Kiai secara terbuka untuk masuk dalam gelanggang politik praktis.

Sejumlah Kiai ataupun nyai berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, beberapa diantaranya:

Gus Yasin putra Kiai Maimun Zubair, berpasangan dengan Ganjar Pranowo menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kiai Fathul Huda (Tuban), Nyai Kartika Hidayati (Lamongan), Kiai Moch. Qosim (Gresik), Kiai Syaefuddin (Sidoarjo), Kiai Hamid Wahid dan Kiai Fadil Muzakki (Situbondo), Kiai Busyro Karim dan Nyai Dewi Khalifah (Sumenep), dan di Kabupaten Jember, Kiai Arief Muqiet yang berpasangan dengan Faidah (Hidayaturrahman & Sudarman, 2019) Menguatnya identitas Islam di panggung politik Indonesia (Nastiti & Ratri, 2018) baru-baru ini menjadi daya tarik para pengamat politik dan akademisi. Mobilisasi masa dengan atribut Islam (Gueorguiev et al., 2019) memenuhi jalanan dalam beberapa aksi bela Islam dalam pemilihan gubernur di Jakarta 2017 maupun pemilihan presiden 2019.

Di sisi lain ada gerakan pula dari Islam tradisional yang lebih moderat dalam menyikapi peristiwa politik lebih dekat dengan golongan nasionalis sekuler (Romli, 2019). Lihat saja ke belakang melalui sejarah. Irisan faksi-faksi ini meyakinkan seakan dibuat terus menyejarah untuk tidak dikatakan abadi. Dari peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia sampai pasca kemerdekaan memperlihatkan gejala ini dengan berbagai macam transformasinya. Identitas Islam yang diarak memenuhi jalanan Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia, menandakan aktifitas formalisme Islam yang digunakan untuk kepentingan tertentu. “ini murni politik bukan semangat agama”, kata Kiai Ma’ruf Amin, pasangan Jokowi dalam pilpres 2019. Sejumlah Kiai juga mengkhawatirkan ini:

terjadinya simbolisasi agama untuk membungkus kepentingan politik dengan mengorek-ngorek pembenaran dalil. Pada pilpres 2019 ini Rois Amm PBNU hasil muktamar ke-33 tahun 2015, Kiai Makruf Amin mencalonkan diri sebagai wakil Jokowi. Dari hasil keputusan KPU pada tanggal 22 Mei 2019 memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf menjadi Presiden dan Wakil Presiden di periode selanjutnya.

Bagian 5

Sang Kiai Bicara Agama dan Politik

Hubungan Agama dan Politik

Berbicara mengenai relasi agama dan politik, kedua entitas tersebut memiliki proses tarik menarik kepentingan. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan-aturan yang ada. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antar kedua entitas tersebut. Negara yang didominasi unsur kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan melahirkan negara teokrasi yang cenderung melahirkan adanya hipokrisi moral maupun etika yang ditunjukkan para pemuka agama. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pencampuradukan unsur teologis dan materialis secara konservatif. Adapun negara yang mendominasi relasi agama justru menciptakan negara sekuler

yakni persoalan agama kemudian termarjinalkan dan tereduksikan dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara, keduanya harus seimbang. Benturan agama dan politik itu hubungannya memang ilmiah, antara agama dan politik itu memang harus terpisahkan. Dalam kehidupan sekarang ini ada dua kutub yang ekstrim, kutub pertama menyatakan jangan bawa-bawa agama ke dunia politik. Seperti contoh di Turki itu pernah mengalami sekuler ekstrim dimana disaat ada orang azan tidak boleh menggunakan bahasa Arab tetapi menggunakan bahasa Turki, dahulu orang Turki dilarang belajar Quran yang dimana bisa diberi pelanggaran dan Wanita juga dilarang mempergunakan jilbab karena akan melanggar aturan sekulerisme di Turki.

Agama dan politik merupakan isu dalam sejarah manusia modern, keduanya pun senantiasa memantik polemik ihwal posisi agama dalam arena politik yang setidaknya, melibatkan dua kelompok yang secara diametris berlawanan. Satu pihak mengampanyekan agar agama dilibatkan dalam setiap pertimbangan politik. Gagasan ini dikenal sebagai teokrasi, pemerintahan berbasis agama. Konsekuensinya, agama menjadi payung tertinggi dalam setiap kebijakan politik, ada pihak yang justru menolak campur tangan agama dalam urusan politik. Agama harus ditepikan dari diskursus publik dan dimengerti sebagai perkara privat yang hanya menyangkut kepentingan individu per individu. Agama tidak lebih dari urusan ritual yang menggambarkan dependensi manusia dengan tuhannya. Didalam perpolitikan Indonesia, isu ini turut

mewarnai perjalanan sejarah bangsa. Sejak awal pembentukannya, hingga saat ini. Dulu ketika pembuatan piagam jakarta, poin pertama yang semula berisi “ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat islam bagi para pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang maha esa”. Perubahan ini terjadi setelah para tokoh berdiskusi dan sebagai upaya agar tidak terjadi perpecahan diantara warga negara lainnya.

Maka dari itu agama jangan dibawa-bawa ke politik. Politik itu urusan mengelola negara, urusan mengelola kehidupan dunia karena Agama itu murni tidak ada kaitannya dengan politik. Ada juga kelompok yang kita sebut kelompok Islam puritan yang sangat tradisionalis menyatakan jangan bawa-bawa agama ke politik, ini sama ekstrimnya ketika sudah mengurusin agama bagaimana cara mengurusi sholat, bagaimana toharof tidak membicarakan negara untuk membicarakan politik.

Para ulama yang kredibel dalam Islam misalnya Al-Ghazali, kemudian Al-Mawardi yang mengatakan bahwa agama dan politik itu ibarat dua anak kembar yang lahir dari rahim yang sama. Ketika hanya mengurusi agama tidak ikut mengurusi politik maka agama ini tidak ada yang membentengi hanya saja menjadi kekuatan moral saja.

Ketertiban, kerapihan, keindahan. Al-Mawardi berkata dalam Ahkam Sultaniyah, Al-Ghazali di kitab Ikhya’nya beberapa kitab banyak termasuk Ibn-Utaymiyyah dalam As-Siyasah As- Syari’ah fi Islahi Ar-Rai War-Ra’iyah yang

sekarang pendapat- pendapat Ibn-Utaymiyyah banyak dikutip oleh kelompok puritan dimana mereka menyebut dirinya salafi tapi mereka sepertinya tidak membaca buku Ibn Temiyah yang mengatakan bahwa siasat itu bagian dari agama bahkan ada hadis Rasul dipermasalahkan oleh Imam Ad-Dailami yang hadistnya berkata Imam Ad-Dailami dari hadist yang dibawakan oleh Rasulullah S.A.W mengatakan bahwa tegaknya dunia itu dengan empat hal. Maksudnya tegak itu seperti kerapihan, ketenangan, kebaikan dunia kalua empat hal ini berperan dengan baik.

1. Diilmi I'ulam dengan ilmunya jadi semua tindakan, kebijakan yang dibuat di negara ini berdasarkan keilmuwan dan akademis bukan juga perasaan tetapi faktornya ilmu adalah kebijakan yang dibuat.
2. Wa'adlil umar, keadilan dari para eksekutif. Umar adalah para penguasa dan keadilan, integritas, adil secara umum menyamakan yang sama membedakan yang berbeda tetapi kalau ada menyamakan atau yang membedakan sama-sama warga negara.

Tidak adil jika ada warga asing diperlakukan sama dengan negara kita sendiri. Makanya kata Rasul ilmunya ulama, keadilan penguasa, kedermawanan orang-orang kaya, pengusaha dermawan. Ingin membayar pajak kemudian wabidu'a il fukar keduanya orang- orang fakir peduli dan orang fakir juga mawas diri. Ada keadilan yang ditegakkan oleh para penguasa maka orang yang kuat akan memakan yang lemah, kemudian seandainya orang- orang kaya tidak ada kemauan

makan akan terjadi banyak permasalahan kecemburuan, krisis sosial orang mencuri dan orang merampok mengapa seperti itu dikarenakan orang kaya tidak peduli, mereka hanya bisa memamerkan dihadapan orang miskin bagaimana tidak terjadi iri sosial mereka tahu kalau uang mereka di korupsi. Kemudian doa ilfukor orang miskin tidak diperdulikan oleh orang-orang kaya termasuk negara. Ini menggambarkan bahwa memang politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan.

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide ‘kebaikan’ terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu.

Identitas berupa suku dan golongan seperti saya terlahir sebagai orang Indonesia suku Sunda itu bukan suatu pilihan. Identitas itu melekat tidak bisa melepaskan identitas itu sendiri, secara demokrasi tidak salah orang Sunda memilih orang Sunda. Jadi kalau politik identitas dipahami bahwa orang Sunda boleh memilih orang Sunda dan orang Jawa boleh memilih orang Jawa itu tidak jadi masalah. Yang bermasalah

itu ketika orang Sunda karena ingin dipilih menjelekkan orang Jawa atau orang Jawa karena ingin dipilih jelekkin orang Sunda. Itu yang disebut mendiskreditkan. Kemudian terkait dengan agama. Agama itu pilihan atau pemberian, seperti seseorang dipilih yang ternyata orang yang memilih ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu atau Budha, sehingga tidak bisa disandingkan dengan agama dengan suku ras dan antar golongan.

Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas; secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas. Fitur dikotomi oposisional menjadi fondasi utama yang membedakan perasaan kolektivitas terhadap yang lain. Tetapi kenyataannya, pada tataran individual pada era modernisasi yang serba mekanik, muncul ‘kegagapan’ untuk memahami struktur masyarakat yang plural, maka intoleransi semakin meningkat. Pendeknya, terjadi ketidaksesuaian imajinasi sosial tentang kehidupan sehari-hari manusia modern dan interaksinya dengan masyarakat umum. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik.

Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat sehingga sangat mudah

untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama dan kelompok tertentu

Politik identitas secara sederhana dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik, dan pertentangan etnik dalam kehidupan Problematika kebangsaan kembali mengedepan tatkala bangsa ini memasuki era demokratisasi.

Pendapat saya kurang sepakat ketika menjadikan agama seolah-olah sebagai sumber konflik politik yang mengaitkan agama itu menjadi sumber konflik tetapi oknumnya yang bermasalah memaksakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pribadinya. Untuk itu kita jangan melakukan ke dzoliman tapi kalau membawa agama untuk menghadirkan kesalahan, sama ketika menghadirkan teori bisnis dalam bisnis apa bermasalah atau tidak. Jadi kurang sepakat apabila agama itu jadi sumber konflik padahal idealnya agama itu memberikan inspirasi, memberikan nilai, memberikan arahan dalam berpolitik.

Eksploitasi ras untuk kepentingan kelompok mereka atau politik mereka itu bermasalah seperti contoh yang mudah, politik identitas yang bermasalah itu Zionis. Gerakan Zionis paling konkret politik identitas yang menimbulkan masalah. Zionis ataupun non Zionis seolah-olah tidak berhak hidup,

tidak berhak menikmati keadilan, tidak berhak menikmati kasih saying itu yang bermasalah. Seperti yang mereka lakukan bahkan ketika Biden mengatakan "Saya bukan Yahudi tapi saya Zionis" dengan berkata seperti itu seolah-olah karena Biden Zionis boleh melakukan apapun termasuk ngebom anak kecil, ngebom perempuan- perempuan yang tidak ikut terlibat dalam kasus apapun. Itu politik identitas yang bermasalah karena menjadikan alasan mempergunakan alasan agama. Dengan menggunakan alasan agama bahwa Talmud itu menghalalkan orang yahudi atau kelompok Zionis membunuh siapapun, mengusir siapapun dan mendzalimi siapapun. Tapi kalau orang menjadikan agama sebagai spirit, sebagai nilai untuk menyemangati bergerak, menghadirkan kemaslahatan tanpa mendeskrimitkan. Berarti mereka bukan berpolitik dengan agama, tapi mempolitisasi agama. Mengekspolitisasi agama untuk kepentingan pribadinya. Bahkan kalau membaca literatur-literatur di Islam ketika ada salah seorang sahabat Rasul yang Bernama Ribi'I bin Amir dia datang ke Persia kala itu ditugaskan oleh Umar untuk mendakwahi mereka. Persia kala itu animis ketika datang ditanya oleh general Persia Namanya Rusu. Persia pada saat itu telah maju sudah memiliki gedung- gedung bertingkat, stadion, memiliki perpustakaan, memiliki macam-macam budaya yang peradabannya sudah bagus.

Pada saat itu jawaban Rief Ibn Amir mengatakan, "saya datang kesini untuk mengajak kalian dari ibadatun ibad illa ibadatirukim mengajak kalian hanya untuk tunduk patuh

kepada tuhannya seluruh manusia yaitu Allah. Dari pada kalian tunduk patuh hanya kepada orang, kepada raja-raja. Mengajak kalian untuk tidak hanya taat sama raja-raja melainkan patuh yang pertama terhadap Allah Swt.

Mengajak dari kesempitan dunia kepada kelapangan dunia dan akhirat. Mengajak untuk keluar dari kezoriman walaupun atas nama agama, bibel mengatakan, bibel yang mereka buat (Injil). Bahwa yang berhak mendengar injil dan kemudian hanya siapa yang tidak berhak itu akan bermasalah kalau sampai harus mendengar Injil intinya ada kondisi-kondisi yang rasial. Dimana orang ini diposisikan karena dia bukan keluarga raja melainkan harus menjadi budak. Jadi ingin menekankan bahwa kezoliman walapun memakai nama agama itu bermasalah.

Bagian 6

Sang Kiai Bicara Sistem Negara dalam Islam

Sistem Negara dalam Islam

Konsep negara ideal tidak akan ada habisnya seiring dengan permasalahan-permasalahan yang dialami manusia itu sendiri yang selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan jaman. Karena manusia sebagi makhluk sosial (social being), sebagai wujud pada kenyataan bahwa setiap manusia tidak pernah ada yang mampu lahir dan berkembang tanpa bantuan dari orang lain, karena hidup berdampingan dengan orang lain itu sendiri merupakan fitrah dari kehidupan manusia. Sebagaimana individu- individu manusia adalah besifat organik, yang dilahirkan kemudian melewati tiga fase pertumbuhan, diantaranya pertumbuhan awal, pertumbuhan dewasa, pertumbuhan tua yang akhirnya mereka akan merasakan kematian. Salah satu karekteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya, adalah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah-kisah kejayaan sejak Nabi Muhammad (periode Madinah) sampai masa-masa jauh setelah beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang

spektakuler ekspansi milter kaum Muslimin, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan para sahabat Nabi. Seperti di masa Umar bin Khattab, kenyataan historis tersebut menunujukan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan kelak setelah kaum Muslim berkenalan dengan Aryanisme, Persia, muncul ungkapan bahwa "Islam adalah agama dan negara" (al- islam din wa Dawlah), yang mengisyaratkan keterkaitan yang erat antara keduanya. Sebaliknya, sejarah juga mencatat bahwa perpecahan, pertentangan, dan bahkan penumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi justru karena persoalan politik.

Oleh karena itu manusia dari individu-individu yang berbeda baik jenis kelamin, suku, bangsa, ras, dan agama, yang kemudian berkembang biak yang pada akhirnya membentuk komunitas berdasarkan kebangsaan dan ideologi kelompoknya. Negara atau pemerintahan sebagai sebuah institusi yang akan menata dan memelihara ketentraman masyarakat, diharapkan mampu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat yang semaksimal mungkin dapat disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, negara mempunyai tingkat kesulitan dalam prosesnya. Dengan kata lain membentuk suatu negara merupakan cara terdekat dengan fitrah manusia yang bisa mentoleransi semua keadaan, tetapi merupakan cara yang paling sulit dilakukan untuk mencapai tujuan. Konsep negara secara universal adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia.

Negara khilafah dan memang sebetulnya dalam Islam terkait sistem negara dan termasuk bagaimana agama itu yang ke enam, ya maksudnya enam itu bagaimana agama memenang sistem demokrasi. Dari literatur yang saya baca, dan saya yakini bahwa itu yang tepat. Yang tepat gitu ya dalam Islam ini belum mengatur secara depinitif atau kuncinya secara depinitif tentang sistem bernegara. Tapi, Al-Qur'an maupun Hadis memberikan arahan dan inspirasi tentang bagaimana seharusnya menghadirkan kebaikan dalam bernegara. Modelnya boleh beragam. Makanya ada satu buku mungkin nanti bisa dirujuk, ditulis oleh Abul A'la Al Maududi. Judulnya Al-Khilafah Wal Mulk. Khilafah dan Kerajaan, dia menulis buku judulnya itu Khilafah dan Kerajaan Beliau banyak literatur baik dari Al-Quran maupun dari Hadis-hadis Rasul Saw., maupun kebijakan-kebijakan yang beliau ambil serta para kilab fakurasi dia.

Kita menemukan misalnya, ketika Rasulullah Saw., mewafan, kala itu Rasulullah Saw., tidak menulis wasiat apapun tentang siapa yang nanti akan menggantikan dia dan bagaimana sistem pemilihannya, sistem pemilihan pengganti beliau itu yang kita kena dengan istirahat kolifah. Rasulullah tidak membuat wasiat tertentu, mungkin kalau bahasa kita tidak cawe-cawe. Rasulullah cuma ketika beliau sakit kemudian perlu imam untuk mengimamin solat, beliau nyuruh Abu Bakar yang imamin. Nah kemudian dari isarat-isarat kecil seperti itu, para sahabat berpikir kalau Rasul saja ridho kepada Abu Bakar untuk ngimamin solat kita, ngimamin kita dalam urusan

akhirat, masa kita tidak Ridho dengan Abu Bakar untuk ngimamin dalam urusan dunia, tapi itu inspirasi yang diambil dari penugasan Rasul, Rasul tidak membuat pernyataan resmi bahwa pengganti saya nanti Abu Bakar, tidak.

Makanya sempat terjadi sedikit, bukan konflik, sedikit pembicaraan di kalangan sahabat di Bani Saqifah, tentang setelah Rasul mufat, siapa yang harus menggantikan. Apakah dari Ansor, apakah dari Muhajirin. Sampai kemudian, putusan diambil Abu Bakar yang paling berharga. Dengan isarat-isarat kecil tadi. Rasul aja ridho pengganti sholat beliau, pengganti yang jadi imam sholat selama Rasul sakit, Abu Bakar. Jadi Rasul aja meridhoi Abu Bakar jadi pimpinan urusan akhirat. Apalagi, masa kita tidak Ridhoi Abu Bakar jadi pimpinan dalam urusan dunia. Menggantikan Riki. Itu proses pemilihan Abu Bakar. Jadi, kesannya Rasul menyerahkan kepada Flur. Silahkan dipilih saja. Kalian beristiharat kira-kira siapa yang pas, terpilih Abu Bakar itu proses pertama, metode pertama kedua ketika Abu Bakar mewafat Abu Bakar kala itu membuat wasiat. Membuat wasiat. Sepeninggal Abu Bakar, Umar lah yang menggantikan. Itu pun setelah Abu Bakar meminta pendapat dari beberapa sahabat senior. Saya punya rencana begini, bagaimana pendapatan anda untuk mempunyai rencana, saya ingin memilih Umar.

Tapi kalau tadi di dimana Abu Bakar cawek-cawek, ikut mengapa harus Umar. Abu Bakar orang baik yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Islam. Dia tidak punya kepentingan pribadi. Kalau mempunyai kepentingan

pribadi, harusnya anaknya yang dipilih, Abdul Rahman bin Abu Bakar atau adiknya lebih pas. Dan ketika mendapatkan persetujuan dari beberapa sahabat senior, akhirnya tertulislah wasiat untuk Umar.

Sebagai pengganti Abu Bakar. Modelnya beda lagi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, selain itu banyaknya suku, budaya dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri.

Abu Bakar wasiat. Ketika Umar mau meninggal, kalian ditusuk. Kemudian dia mau meninggal. Saat mau meninggal, kala itu tidak bikin wasiat kayak Abu Bakar. Tidak menyerahkan juga sama Flur, terbuka silahkan, Musawarak, Kalifat, Umar bikin tim formatur mungkin kalau bahasa kita,

parmen bikin tim formatur enam orang antara lain, Usman, Ali, Tolhah Sa'ad bin Abi Waqas, Zubair bin Awang, Abdul Rahman bin Auf. Ini sahabat senior, dari berbagai macam profesi ada bisnisman, kata Umar, ini tim formatur yang enam orang ini, usawarah. Tentukan salah satu di antara kalian yang harus jadi pengganti saya, kata Umar. Enam orang ini berkumpul. Ini siapa nih kira-kira dari enam orang ini yang paling layak untuk menggantikan.

Terpilihlah Usman. Usman paling dekat, banyak memberikan kontribusi kurang lebih begini kan dia pengusaha, banyak memberikan kontribusi, ketika Umar mau meninggal untuk pemilihan Usman pakai tim formatur perwakilan, berarti kan tim formatur perwakilan berarti Umar mewakilkan kepada enam orang ini untuk memilih siapa pemimpin. Ketika Usman mau meninggal, Kala itu, Usman apa namanya, gak sempet untuk menetapkan siapa pengganti setelah dia kata Usman, saya kembalikan kepada Umar aja, silahkan kembali lagi seperti ketika Rasul akan memilih Abu Bakar. Silahkan kalian saja yang beristiharat. Ustzman juga seperti itu. Dia tidak sempat bikin tim formatur. Pokoknya udah terserah saja. Akhirnya, kala itu muncul Ali, muncul Muawiyah. Ada Ali, ada Muawiyah. Dua-duanya muncul. Terjadi konflik seperti apa Artinya bahwa dalam Islam sendiri sistem bernegara, sistem mengelola negara. Sistem mengelola negara itu apakah harus pakai kerajaan, harus pakai istilahnya Demokrasi, demokrasi seperti kita, itu bukan pilihan yang pasti.

Jadi silahkan saja, disesuaikan dengan kebutuhan

lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan seperti apa, di dunia sendiri sekarang Inggris pakai sistem kerajaan juga, ada parlement, ada kerajaan tidak ada masalah, orang tidak ngeributin Inggris yang diributin Arab Saudi saja. Padahal Inggris juga kerajaan. Malaysia juga kerajaan. Bahkan dalam beberapa kondisi, proses penetapan kebijakan, sistem kerajaan itu lebih efektif. Karena ketika raja udah bertitah, udah selesai, gak ada lagi tuh debat di parlement.

Indonesia parlement debatnya kepanjangan karena dia memutuskan untuk harus studi banding dulu, studi bandingnya luar negeri lagi padahal setelah dia studi banding, kata dia semua yang saya datangi tidak cocok dipakai di Indonesia gara-gara studi banding gitu, jadi tidak ada format tertentu yang harus dipakai. Dalam sistem kehalifahan sendiri modelnya macam-macam dalam penetapannya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saja. Seperti Stan, terkait pesan di Stan, lebih kepada pesan pesan atau memang harapan, Stan, terkait tokoh-tokoh agama yang hari ini aktif di politik itu seperti pesan atau memang harapan dari tokoh-tokoh agama yang aktif di politik itu.

Kita berharap tokoh-tokoh agama yang terlibat di politik ini dia menjadi model, menjadi teladan bagi para politisi yang ada untuk menghadirkan politik yang santun, politik yang bermoral, politik yang menghadirkan kemaslahatan, bukan politik dagang sapi. Jadi kan sekarang ini banyak politik maklar jadi apa kepentingan yang di dapatkan Kalau saya menyetujui ini atau saya menolak ini itu kan maklar atau kayak gitu bukan

politisi. Kita ingin tokoh-tokoh agama yang terlibat di politik ini, mereka hadir untuk menjadi model. Bahwa politik yang santun ini, politik yang bermoral ini, politik yang menghadirkan kemasyarakatan jauh dibutuhkan oleh masyarakat dibanding politik dagang sapi, dibanding politik kepentingan.

Bagian 7

Agama dan Politik di Cirebon dan Indonesia

A. Agama dan politik di Cirebon

Cirebon dijuluki sebagai kota wali, dari di mana awal mulanya adalah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama kesultanan Cirebon. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Jawa[1]. Selain sebagai raja, beliau juga menjadi kepala Pemerintahan yang mengatur tata kelola daerah, seperti Pelabuhan sebagai jalur pedagangan, kebudayaan, hingga pendirian tempat keagamaan sebagai pusat penyebaran Islam. Cirebon kota wali, juga dijuluki kota santri karena banyaknya Pesantren. Idealnya yang menjadi pejabat di daerah Cirebon adalah orang-orang yang sholeh. Namun tidak semua orang sholeh, ada juga yang tidak sholeh. Kita ingin idealnya pemimpin di Cirebon yang mengerti agama. [2]

Sunan Gunung Djati, adalah satu di antara Wali Songo yang berhasil menjadi pemimpin politik sekaligus pemimpin

[1] Alfan Firmanto. 2015. Historiografi Islam Cirebon. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1)

[2] 2 Kutipan Wawancara Kiai Nurul 'Ain Akyas, Lc

spiritual, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai etika keislaman, serta kearifan tradisi lokal. Ia lahir di Makkah pada tahun 1448 Masehi. Seperti ditulis Eman Suryaman, Sunan Gunung Djati merupakan pemimpin yang mentransenden dan mengimanen[3]. Di tangannya berpadu antara kekuasaan politik (political power) dan kekuasaan spiritual (spiritual power). Perpaduan antara kekuatan politik di satu sisi dengan kekuatan spiritual pada sisi yang lain, tidak hanya memberikan kemampuan untuk mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan masalah ritual dan upacara-upacara keagamaan, tetapi juga mampu mengontrol bidang sosial kemasyarakatan, seperti masalah ekonomi, pendidikan, pertahanan, keamanan dan kebijakan politik.

Sunan Gunung Djati ini adalah tokoh Kharismatik serta unik di antara Sunan lainnya. Beliau adalah tokoh agama dan juga negarawan, beliau memiliki keraton sebagai pusat penyebaran agama saat itu, hingga ikut terlibat dalam berbagai pertempuran Padjajaran, hingga Sunda Kelapa dan juga Banten. Seharunya para pemimpin Cirebon bisa seperti beliau, menjadi seorang kepala pemerintahan dan juga tokoh yang faham agama[4].

Selain sosok kepemimpinannya, Sunan Gunung Djati memiliki pesan yang begitu luar biasa yaitu “Ingsun Titip

[3] Eman Suryaman, *Jalan Hidup Sunan Gunung Djati, Sejarah Faktual Dan Filosofi Kepemimpinan Seorang Pandhita-Raja, ed. Dodo Widarda* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2015)
[4] Kutipan Wawancara Kiai Nurul ‘Ain Akyas, Lc

Tajug Lan Fakir Miskin", kalimat atau ungkapan tentang nilai moral keislaman dan sosial yang diwasiatkan Sunan Gunung Jati. Kalimat ini dianggap sebagai inti ajaran Sunan Gunung Jati. Wasiat tersebut Al-Qur‟an dan Hadits yang menjelaskan tentang memakmurkan Masjid dan memuliakan Fakir Miskin. Sehingga menjadi penting bagi umat islam untuk memegang erat kedua pokok ajaran tersebut.

Pesan tersebut harusnya menjadi tanggungjawab orang Cirebon, terkhusus para pemimpinannya. Karena ini bukan semata-mata wasiat biasa, namun ajaran Islam yang berhubungan erat dengan konsep ubudiyah yaitu "Tajug" sebagai Hablumminallah dan "Fakir Miskin" mewakili *Hablumminannas*[5]

Namun demikian, fakta hari ini Cirebon belum memiliki sosok pemimpin seperti selayaknya Sunan Djati. Karena dalam 20 tahun terakhir, Bupati Cirebon selalu tersandung kasus korupsi, mulai dari jabatan 2 periode Drs. H. Dedi Supardi, M.M. hingga 2 periode berikutnya Drs. H. Sunjaya Purwadi Sastra, M.M., M.Si. Kepemimpinan di Cirebon belum sejalan dengan semangat yang dibawa oleh Sunan Gunung Djati.

Jika dalam Al Quran dan hadits kita sering dengar:

للاخي نم مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد بلع

> *"Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian". [HR. Abu Daud]*

[5] Ibid

Jadi segala sesuatu memang tergantung siapa teman kita, siapa dibelakang kita, seperti kasus di Cirebon. Kita harus melihat siapa dibelakangnya, partai nya bagaimana, dan sistem politik. Harus diakui sistem politik kita biayanya sangat tinggi (*high cost*). Berapa modal politik yang dikeluarga, kita juga dapat menghitung berapa gaji seorang bupati, sehingga seringkali saat menjabat , pemimpin kita memikirkan bagaimana caranya balik modal.[6]

Hasil penelitian KPK pada tahun 2016 menyebutkan calon bupati atau wali kota butuh dana Rp 20 hingga Rp 100 miliar untuk memenangi pilkada. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur akan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi, KPK mencatat pemenang pilkada yang mengeluarkan ongkos besar akan cenderung melakukan korupsi dengan memberikan kemudahan perizinan dan akses pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah daerah kepada pihak tertentu[7].

Meskipun demikian, tidak semua soal biaya politik yang tinggi. Di Cirebon ada calon kepala desa yang sudah mengeluarkan biaya banyak namun tidak terpilih dan kalah dengan calon biasa. Di Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) Gubernur 2 periode pernah bercerita punya apa untuk ikut Pilkada, beliau menjawab hanya memiliki sebuah mobil kijang yang nilai nya mungkin tidak seberapa. Namun selalu ada jalan,

[6] Kutipan Wawancara Kiai Nurul 'Ain Akyas, Lc

[7] https://www.voaindonesia.com/a/biaya-politik-besar-rentan-terjadinya-korupsi/4207140.html

wakil nya Dede Yusuf serta Deddy Mizwar yang saat itu popular dan dikenal banyak orang, sehingga beliau bisa menjabat sampai 2 periode. Akhirnya saat menjabat Kang Aher tidak memikirkan bagaimana caranya balik modal, karena tidak ada biaya politik yang besar, beliau fokus membangun Jawa Barat. Hingga akhir masa jabatannya beliau tidak punya apa-apa, hanya rumah dan itu juga hasil pemberian negara. Dan saat ini akan maju sebagai anggota DPR RI, beliau tidak memiliki apa-apa, selain bantuan juga dari istri nya Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si yang hari ini menjadi anggota DPR RI dan akan kembali ikut dalam pemilihan anggota DPR RI.

Artinya dari semua kasus yang terjadi masih banyak orang baik. Masih banyak orang baik yang seringakali tidak punya duit. Namun demikian kembali lagi seperti dalam hadits sebelumnya, tergantung siapa dilingkungan kita. Seperti yang pernah dikatakan juga oleh Nurcholis Madjid yang pernah berniat menjadi presiden di republik tercinta, akhirnya harus menyadari realitas sosial yang tak mengenakkan ini.

> *"Kata beliau, untuk menjadi presiden di republik ini, selain visi dan misi, seseorang harus mempunyai gizi. Apalagi yang dimaksud dengan gizi, kalau bukan urusan logistik dan keuangan?.*

Di tengah sistem politik hari ini, harapannya adalah ada di masyarakat Indonesia yang lebih cerdas. Sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Cirebon Timur, salah satu calon kepala desa didukung oleh kalangan preman, sehingga masyarakat diancam untuk memilih. Masyarakat akhirnya merasa takut, dan berfikir belum jadi saja sudah

bertidak mengancam, apalagi jika sudah menjabat, tidak mendapat kepercayaan masyarakat.

Pendidikan politik itu penting, masyarakat sudah lebih cerdas. Ditambah hari ini generasi milenial tidak mudah terprovokasi dan lebih cerdas dalam menyikapi perpolitikan di Indonesia hari ini. [8]Hampir setengah jumlah pemilih yaitu 55% adalah pemilih muda[8], mereka yang melek politik dan tidak mudah dipengaruhi oleh uang serta ancaman. Edukasi politik lebih mudah karena generasi ini pandai menggunakan gadgetnya, dibandingkan dahulu kita harus pergi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memberikan edukasi politik, sekarang semunya lebih mudah.

B. Pesta Demokrasi 2024

Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden nanti, diharapkan tidak ada lagi perpecahan seperti selayaknya dalam pemilihan sebelumnya, ada istilah-istilah cebong kampret serta yang lainnya. Semua memiliki pilihan sesuai keyakinannya masing-masing, dalam demokrasi hal tersebut harus dihargai. Oleh sebab itu, silahkan tentukan pilihan yang terbaik diantara yang baik, tanpa harus menghina calon lain sehingga menimbulkan perpecahan diantara masyarakat.

> *"Sesungguhnya memimpin manusia merupakan kewajiban yang paling utama, bahkan tidak tegak urusan agama dan dunia kecuali dengan adanya kepemimpinan",*perkataan beliau ini diakhiri dengan: *"Maka memilih pemimpin menjadi kewajiban agama dan ibadah kepada Allah Swt".* (Ibnu Taimiya).

[8] https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu- kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024

Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa ini bukan hanya soal memiliki nomor 1, 2 ataupun 3. Namun kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan yang sudah dipilih. Mengapa kita memilih calon pemimpin tersebut, karena ini juga soal akidah. Harus diyakini bahwa memilih pemimpin itu yang terbaik, yang tidak hanya diiming-imingi uang hingga bantuan untuk Pesantren, namun harus dipastikan bahwa pemimpin yang kita pilih bisa menghadirkan untuk kemasalahatan untuk semua nya, untuk agama, bangsa dan negara.

Penutup

Mempertimbangkan nilai yang dijadikan pijakan sekaligus ajaran-ajaran yang dirumuskan oleh para kiai dalam politik Islam di Indonesia, maka tidak heran jika keterlibatan kiai dalam perpolitikan di Indonesia mengakar dalam. Apalagi jika ditarik kepada pola perjuangan para kiaidi abad 18, 19maupundi abad ke 20 tidak hanya tampilsebagai pendulang suara dalam politik praktis, namun lebih dari itu dapat memformulasikan prinsip yang mengacu pada religiusitas, filosofis dan kenegarawanan sebagaimana yang bisa kita lihat dari cetusan-cetusan para kiai menanggapi dinamika perpolitikan di Indonesia. Disisi lain peran politik kiai tidak lebih dari sekedar vote getter. Inilah yang menjadi kegelisahan banyak kalangan, terutama para pendukung dan simpatisan kiai. Pada kasus demikian kebanyakan kiai hanya dimanfaatkan oleh mesin partai atau tim sukses calon meskipun bisa ada kontrak atau timbal balik keuntungan materi melalui program pemerintah. Peran Kiai sebatas vote getter telah mencabut akar substansi kiai sebagai pembimbing umat dan pemantau dalam perumusan prinsip-prinsip strategis yang diusung oleh partai maupun pasangan calon dalam pemilu. Dampak yang paling menonjol dirasakan oleh kalangan akar rumput adalah perebutan pengaruh antar kiai, sehingga memecah belah masyarakat. masyarakat yang sudah terbiasa dengan cara berfikir rasional terhadap fungsi ideal dari pranata yang menjadi struktur masyarakat, maka akan melihat dengan cara bagaimana seharusnya

kiai menempatkan diri sebagai panutan umat, guru spiritual maupun guru bangsa. Namun bagi yang dangkal cara kerja fikirannya akan menjadi problem tersendiri bukan hanya untuk dirinya tapi menjadi persoalan atas semakin keruhnya persaingan politik, terutama jika didukung dengan media sosial.

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik (Ed), (1979). *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES,.

Arkoun, Mohammed, (1994). *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagi Tantangan dan Jalan Ba*ru, Jakarta: INIS,.

Abdurrahman. (2009). Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik NU. *Karsa*. 15(1).

Achidsti, Sayfa. (2010). Nahdlatul Ulama: Dalam "Konflik", Tradisi, dan Rekonsiliasi. *Fikra.* 1(3).

Anam, Choirul. (1999). *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Bisma Satu Printing.

Arifin, Ichwan. (2008). *Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Muktamar II Semarang* [Tesis]. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

As'ad, Said Ali. (2008). *Pergolakan di Jantung Tradisi. NU yang Saya Amati*. Jakarta: LP3S.

Baudrillard, Jean,(2013). *Masyarakat Konsumsi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Bruinessen, Martin Van,(1995). *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat: Tradisi- Tradisi Islam Di Indonesia*, Bandung: Mizan,

Buliet, Richard. (1972). *The Patricians of Nishapur*. Cambridge: Harvard University Press.

Dhofier, Zamakhsyari. (1984). *Tradisi Pesantren, Studi tentang*

Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3ES.

Dhofier, Zamakhsyari, (2011). *Tradisi pesantren* (edisi revisi), Jakarta: LP3ES.

Faridl, Miftah. (2007). Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*. 6(11).

Herdiansyah Amanu dan Lovia Evanne, Peran Efek Komunikasi Politik Dalam Kekisrukan diParta Demokrat, *Jurnal Balayudha* 1(1).

Horikoshi, Hiroko,(1990). *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M,.

Jonge, (1995) *Huub de and Elli touwen Bouwsma, Across Madura Strait: The Dinamic of an insular society*, Leiden: KITLV,.

Horikoshi, Hiroko. (1987). *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Karim. A.Gaffar. (1995). *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

https://news.republika.co.id/berita/opp5r4330/ini-7rangkaian aksi-bela-islam-sebelum-ahok- divonis-2-tahun-penjara-part2 https://www.kompas.tv/nasional/412457/kronologi-denny-indrayana- dapat-informasi-mk-soal-putusan-sistem-pemilu-hingga-dilaporkan- ke-polisi

Kamaruddin Hasan, *Efek Komunikasi Politik,* Jurnal FISIP UNIMAL.

Kiswanto, Heri. (2010). *Gagalnya Peran Politik Kiai dalam Mengatasi Krisis Multidimenasional*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres.

Lauer, Robert H., (1993). *Perspektif tentang perubahan social*,

Jakarta: Renika Cipta,.

Martono, Nanang,(2014). *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakata: Raja Grafindo.

Makmur, Ahdi. (2006). Ulama dan Penguasa di Indonesia (1945-1965). *Jurnal Ittihad*. 4(6).

Muhammad. (2010). Nahdlatul Ulama dan Perubahan Budaya Politik di Indonesia. *Jurnal el-Harakah*. 12(1).

Mulkhan, Abdul Munir. (2009). *Politik Santri: Cara Merebut Hati Rakyat*. Yogyakarta: Kanisius.

Nahrawi, Amiruddin,(2008). *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Gama Media.

Sarbini, Ahmad,(2014). *Kajian Dakwah Mutiperspektif, Teori, Metodologi, Problem dan Aplikasi*, Bandung: Rosdakarya.

Ridwan. (2010). Kiai dan Politik. *Swara Politika*. 10(2).

Santoso, Purwo. (2010). In The Name of Democracy: Commoditization of Religions by Political Parties in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*. 4(1).

Subiyakto, Rudi. (2011). Keterlibatan Kiai dalam Pilkada. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. 1(1).

Umaimah Wahid, (2016). *Komunikasi POlitik: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Pada Era Media Baru*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Usman, Ali, (2013). *Kiai Mengaji Santri Acungkan Jempol*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren,.

Usman, Sunyoto, (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.

Veeger, K. J., (1993). *Realitas Sosial :Refleksi Filsafat Atas*

Hubungan Individu Masyarakat, Jakarta: Gramedia,

Wahid, Abdurrahman KH (2009). *Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute Press

Dokumentasi Wawancara

Tentang Penulis

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si.

Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah

Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi dengan mahasiswa Prodi S2 Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2023 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Komunikasi Politik Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari pihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu: Komunikasi Politik: Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu: Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021.

Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia: Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun facebook dengan alamat cecep suryana Majalengka dan akun instagram

dengan alamat csuryana56.

Elsavani Prima Putri, lahir di Jakarta 23 September 1987. Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis sangat suka sekali dalam membaca buku maka penulis menyelesaikan program Sarjana Ilmu Perpustakaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saat ini penulis berkarir menjadi Kepala Perpustakaan Kampus Perpajakan Indonesia, Kepegawain, Sekretaris, dan Humas di Perpajakan. Penulis aktif dalam kepengurusan buku-buku Perpajakan yang di terbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Salah satunya Penulis selalu membantu dan juga tertarik untuk membuat buku karena seperti Prof Gunadi Guru besar UI di bidang Perpajakan memberikan motivasi kepada penulis

Tidak hanya membaca atau mengelola buku saja, saat ini penulis melanjutkan hingga program Magister dan buku yang akan terbit yaitu Komunikasi Politik: Sang Kiai Bicara Agama dan Politik (2023), Monografi Dakwah Rabithah Alawiyah (2023), dan Studi Kelembagaan Dakwah: Harmoni Dakwah di tirai Rumah Sakit (2023).

Ingin mengenal Penulis lebih dekat bisa melalui Instagram @elsavani atau email elsavani.putri@gmail.com

Faisal Muhammad Amanullah, lahir di Cirebon 16 Oktober 1997. Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis sangat tertarik dalam kajian komunikasi dan politik, menyelesaikan program Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosisal dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Saat studi program sarjana, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta organisasi lainnya. Selain itu, penulis juga aktif menulis seperti karya nya bersama dosen: Professionalisme Dalam Islam (2019), Startegi Political Marketing Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (2020), serta karya lainnya.

Ketertarikannya dalam kepenulisan berlanjut hingga program magister. Buku- buku yang akan terbit yaitu Komunikasi Politik: Sang Kiai Bicara Agama dan Politik (2023), Monografi Dakwah Keraton Kasepuhan (2023), dan Studi Kelembagaan Dakwah: Dakwah Perspektif Gender (2023)

Saat ini penulis aktif berkarir menjadi kepala divisi Humas dan Media di Pesantren Tahfidz Quran Terpadu Al-Hikmah Cirebon serta aktif dalam berbagai kegiatan kampanye media politik. Mari kenal lebih jauh bersama penulis melalui faisalmuhammadamanullah@gmail.com.

Khairunissa, lahir di Bengkulu 22 Juni 1999. Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis Menyelesaikan program Sarjana dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung

Saat studi program sarjana, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) serta lainnya.

Penulis cukup tertarik di dunia kepenulisan, penulis juga mempunyai buku yang sudah diterbitkan ketika duduk di bangku SMA . Dan sekarang penulis juga akan menerbitkan buku yang ditulis bersama teman-temannya, buku-buku yang akan terbit yaitu Komunikasi Politik: Sang Kiai Bicara Agama dan Politik (2023), Monografi Dakwah Integrasi Pesantren di Lingkungan Masyarakat (Kisah Pesantren Tanpa Bangunan) (2023), dan Studi Kelembagaan Dakwah: Studi Tentang Tipologi Majelis Taklim Insan Kamil (2023),

Saat ini penulis aktif berkarir menjadi content creator di salah satu platform yang ada. Mari kenal lebih jauh bersama penulis melalui khairun220699@gmail.com

معهد الحكمة التحفيظ القرآن

PESANTREN TAHFIDZ QURAN TERPADU

AL-HIKMAH CIREBON

Al-Hikmah 1: Jl. Imam Bonjol No. 13 Desa Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon
Al-Hikmah 2: Jl. Nyi Ageng Serang Desa Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon

Mencetak Generasi Qurani & Dai Rabbani

Pimpinan Pesantren Tahfidz Quran Terpadu Al-Hikmah Cirebon

alhikmahcirebon alhikmahcirebon.ponpes.id

Menghafal Al Quran & Berakhlak Mulia

معهد الحكمة التحفيظ القرآن

PESANTREN TAHFIDZ QURAN TERPADU

AL-HIKMAH CIREBON

Al-Hikmah 1: Jl. Imam Bonjol No. 13 Desa Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon
Al-Hikmah 2: Jl. Nyi Ageng Serang Desa Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon

Mencetak Generasi Qurani & Dai Rabbani

alhikmahcirebon alhikmahcirebon.ponpes.id

Menghafal Al Quran & Berakhlak Mulia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

KH. Nurul 'Ain Akyas, Lc., Dipl.
[Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Terpadu Al-Hikmah Cirebon]

"Agama dan politik itu ibarat dua anak kembar yang lahir dari rahim yang sama. Ketika hanya mengurusi agama tidak ikut mengurusi politik maka agama ini tidak ada yang membentengi hanya menjadi kekuatan moral saja".
[Al Ghazali]

"Islam yang berhubungan erat dengan konsep ubudiyah yaitu "Tajug" sebagai Hablumminallah dan "Fakir Miskin" mewakili Hablumminannas".
[Wasiat Sunan Gunung Djati]

"Maka memilih pemimpin menjadi kewajiban agama dan ibadah kepada Allah SWT"
[Ibnu Taimiyah]

ISBN 978-623-5485-75-1 (PDF)
9 786235 485751

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung
Komunikasi Penyiaran Islam